



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
2020 - 2024
Revisi II



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 dapat terselesaikan dengan baik.

RPJMN tahun 2020-2024 mengusung tema pembangunan “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Tema pembangunan tersebut sekaligus menjadi Visi Presiden dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024. Tema pembangunan ini dilaksanakan melalui 7 agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Direktorat Jenderal Perkebunan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada PN 1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya, Direktorat Jenderal Perkebunan secara konkrit memberikan kontribusi pada Program Prioritas, “Nilai Tambah dan daya saing Industri” dan Sasaran Program antara lain meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian dan meningkatnya daya saing komoditas pertanian.

Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024 akan menjadi panduan, pedoman dan acuan umum tentang arah kebijakan penyelenggaraan perkebunan kedepan untuk diimplementasikan kedalam program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Arah kebijakan ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan agar skala prioritas program dan kegiatan menjadi lebih kongkrit, terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan sekaligus mewujudkan fungsi organisasi yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah.



Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 Revisi II merupakan penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). RSPP merupakan upaya penyempurnaan kebijakan money follow program untuk memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja. RSPP mendesain program agar tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit Eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi K/L dan outcome program mencerminkan hasil kinerja yang ingin dicapai secara nasional (lintas Kementerian /Lembaga atau lintas unit Eselon I)

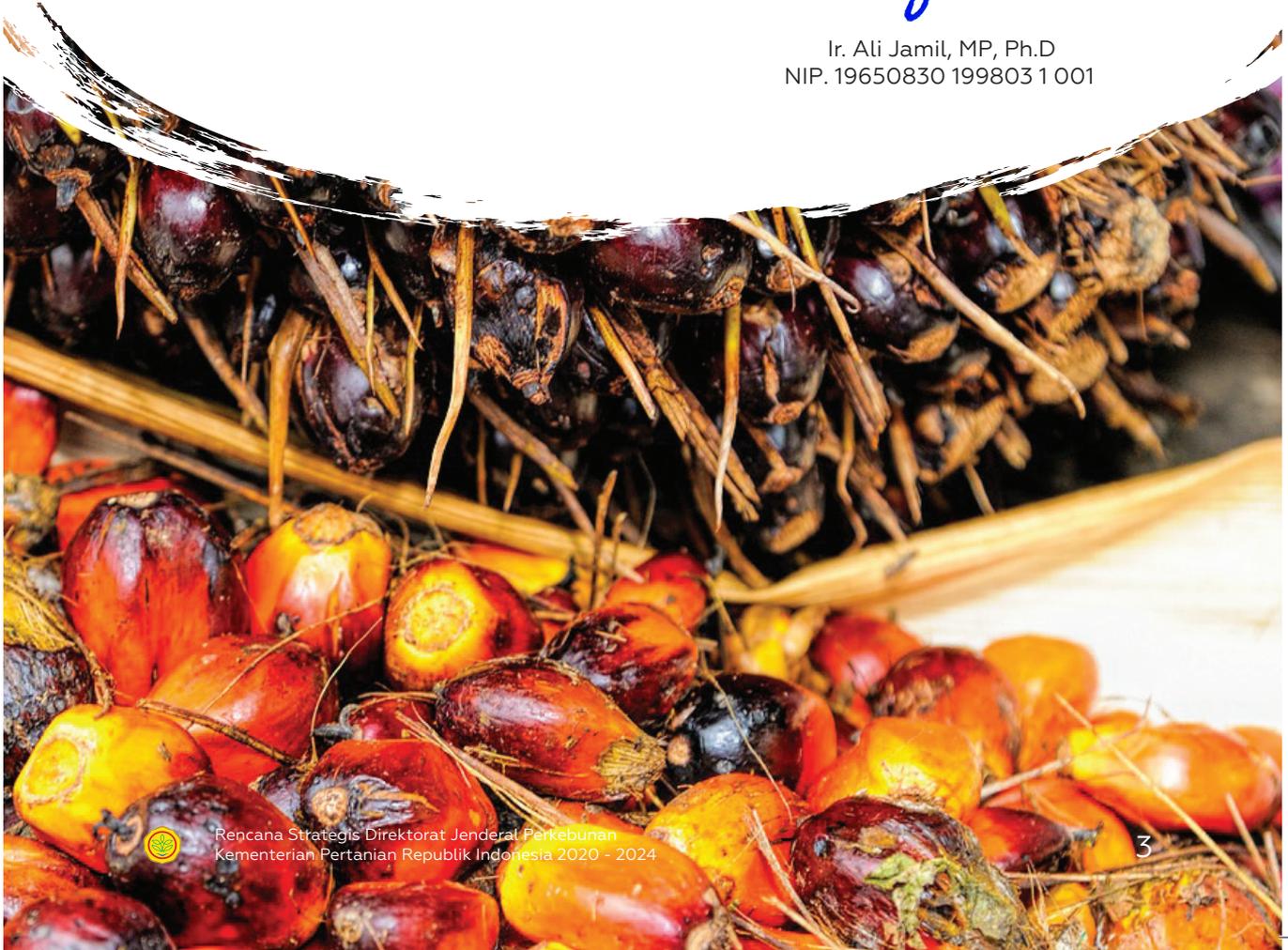
Berdasarkan RSPP, Kementerian Pertanian memiliki 5 (lima) program dan Direktorat Jenderal Perkebunan berkontribusi pada 2 (dua) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan menyumbangkan pemikirannya dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan target sasaran strategis yang sudah ditetapkan bersama di dalam Rencana Strategis ini.

Jakarta, September 2021
Ptt. Direktur Jenderal Perkebunan



Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D
NIP. 19650830 199803 1 001





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4 FAKSIMILI (021) 7815485 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR: 253/Kpts/RC.020/09/2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 351/Kpts/RC.020/12/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk merespon dinamika kebijakan nasional dan mengantisipasi dampak pandemi Covid -19, perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 351/Kpts/RC.020/12/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);



5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1 / KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas binaan Kementerian Pertanian;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Perkebunan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2024.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan perkebunan ini bersumber dari dana sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor 351/Kpts/RC.020/12/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 September 2021

PH. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ALI JAMIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Gubernur di Seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
11. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia.



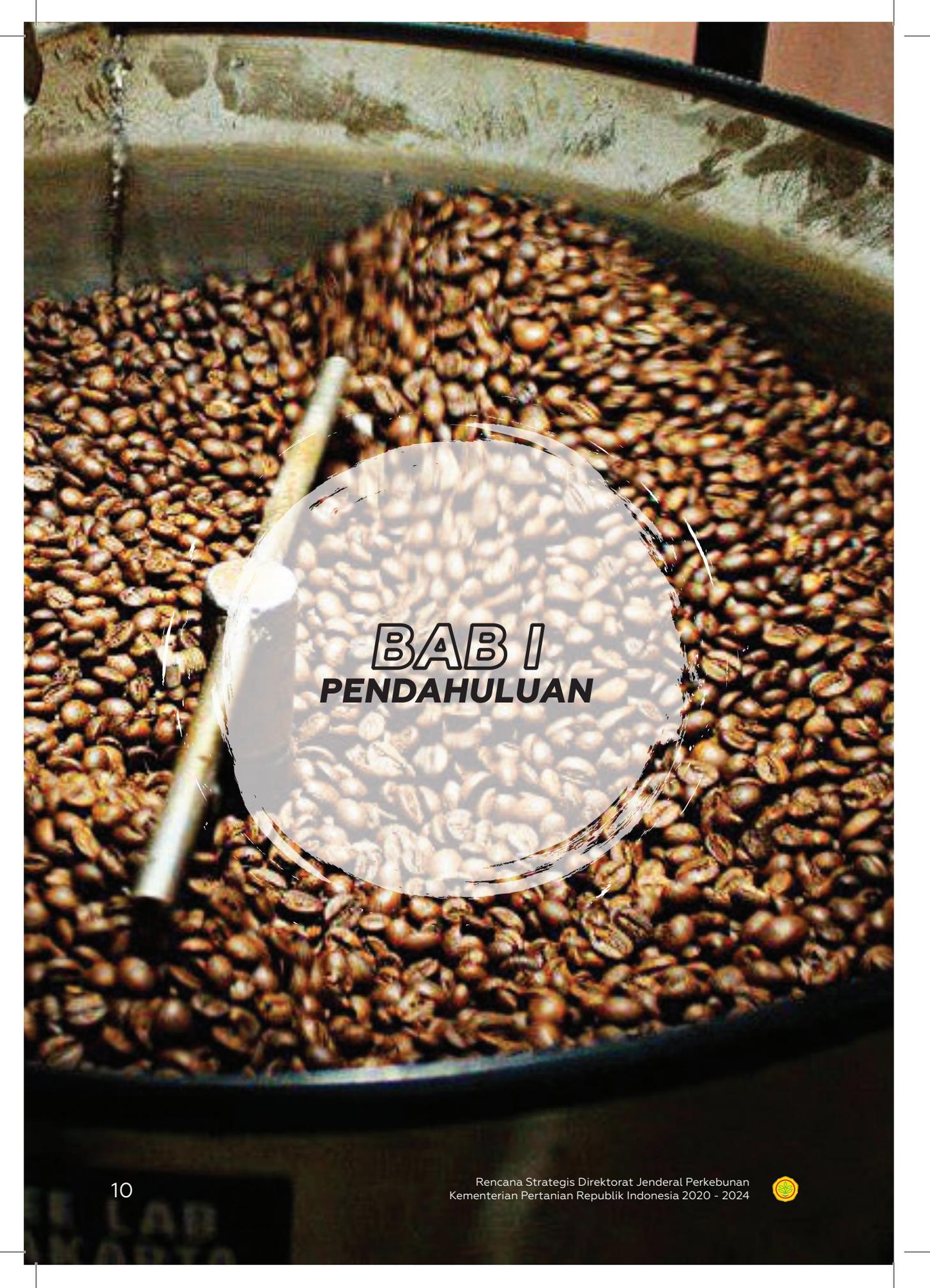
KATA PENGANTAR	2
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN	4-7
DAFTAR ISI	8
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Kondisi Umum	11
1.1.1 Kinerja Pendanaan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019	18
1.2 Potensi dan Permasalahan	24
1.2.1 Potensi Pembangunan Perkebunan	27
1.2.2 Tantangan Pembangunan Perkebunan	37
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	44
2.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan	45
2.2 Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan	47
2.3 Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan	47
BAB III	
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	50
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	51
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian	54
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perkebunan	56
3.4 Kerangka Regulasi	64
3.5 Kerangka Kelembagaan	64
BAB IV	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	66
4.1 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan	67
4.2 Kerangka Pendanaan	71
BAB V	
PENUTUP	72





**DAFTAR
GAMBAR
& TABEL**

Gambar 1.1	Perkembangan Kemiskinan dan Share Perkebunan Indonesia tahun 2000 - 2017	13
Gambar 1.2	Perkembangan PDB dan Share Perkebunan Indonesia, 2000 – 2017	14
Gambar 1.3	Perkembangan PDB Per Kapita dan Share Perkebunan, 2000 – 2017	16
Gambar 1.4	Perkembangan Kemiskinan dan Share Perkebunan Indonesia, 2000 – 2017	17
Gambar 1.5	Kesesuaian Lahan dan RPL	32
Gambar 3.1	Kerangka Strategis Pembangunan Perkebunan Nasional	56
Gambar 3.2	Pendekatan Strategi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian 2020 - 2024	60
Gambar 3.3	Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perkebunan	65
Gambar 4.1	Daftar Komoditas Ekspor	69
Tabel 1.1	Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019	19
Tabel 1.2	Kinerja Luas Areal Komoditas Perkebunan tahun 2014-2018	21
Tabel 1.3	Kinerja Produksi Komoditas Perkebunan tahun 2014-2018	23
Tabel 1.4	Luas Areal per Petani, persen TBM, dan Produktivitas 11 Komoditas Perkebunan	25
Tabel 2.1	Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perkebunan	48
Tabel 3.1	Sasaran, Indikator dan Target RPJMN Terkait Kementerian Pertanian	53
Tabel 3.2	Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024	64
Tabel 4.1	Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 - 2024	67



BAB I **PENDAHULUAN**



1.1 Kondisi Umum

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Data perkiraan *Product Domestic Bruto* (PDB) nasional tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian sebesar 35,39%. Berdasarkan harga berlaku atau 39,29% dan berdasarkan harga konstan 2010. Sementara itu, kontribusi PDB subsektor perkebunan terhadap PDB nasional tahun 2015 diperkirakan sebesar 3,57%, berdasarkan harga berlaku atau sebesar 3,90% berdasarkan harga konstan 2010. Data tersebut menunjukkan masih pentingnya peran perkebunan sebagai penyedia peluang bekerja/berusaha bagi masyarakat Indonesia, pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri (termasuk energi terbarukan) serta dalam perolehan nilai tambah melalui peningkatan daya saing dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Peranan subsektor perkebunan dalam penyediaan peluang berusaha/bekerja semakin penting, mengingat jumlah penduduk Indonesia terus bertambah sedangkan peluang berusaha/bekerja yang diciptakan subsektor lain tidak berlangsung sangat pesat. Menurut data BPS, pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 255,5 juta jiwa dan 20 tahun kemudian (tahun 2035) akan menjadi 305,7 juta jiwa. Sampai dengan saat ini dan 20 tahun ke depan hampir setengah penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan yang tentunya akan mengandalkan perkebunan sebagai sumber pendapatan.

Secara garis besar, pelaku usaha perkebunan di Indonesia terdiri dari **pekebun dan perusahaan perkebunan**¹. Kemudian perusahaan perkebunan dapat dibedakan: 1) Perusahaan Perkebunan Besar Negara, 2) Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PMDN dan PMA), dan 3) Koperasi. Adanya perbedaan kemampuan teknis dan finansial di antara para pelaku usaha tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat kemampuan mereka dalam memperebutkan lahan yang akan digunakan untuk melakukan usaha perkebunan. Oleh sebab itu, hadirnya pemerintah melalui kebijakan yang memberikan perhatian pada perkebunan rakyat melalui strategi **pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani** sangat diperlukan, agar usaha perkebunan secara keseluruhan dapat berjalan berdasarkan **asas efisiensi dan asas berkeadilan secara bersamaan**². Bila tidak demikian, maka akan timbul ketimpangan pada usaha perkebunan yang akan mendorong semakin tajamnya ketimpangan ekonomi dan sosial sehingga kemudian dapat memicu terjadinya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Bila hal ini terjadi maka keberlanjutan usaha perkebunan secara keseluruhan dapat terganggu.

1 Dalam pasal 1 UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa pelaku usaha perkebunan adalah "Pekebun" dan/atau "Perusahaan Perkebunan" yang mengelola Usaha Perkebunan. Kemudian Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Sementara itu, Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

2 Akhir-akhir ini, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, upaya mengatasi ketimpangan menjadi pilar utama kebijakan ekonomi berkeadilan melalui pemerataan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi dinikmati segelintir orang akan menimbulkan kesenjangan.

Data statistik perkebunan 2015-2017 menunjukkan terdapat 8 (delapan) usaha perkebunan strategis nasional yang di dominasi oleh perkebunan rakyat (berdasarkan luas penguasaan lahan), yaitu perkebunan lada (100,0%); kapas (100,0%); jambu mete (99,8%); kelapa (99,0%); cengkeh (98,3%), kakao (97,5%); kopi (96,2%); dan perkebunan karet (84,9%). Sementara itu, pada perkebunan kelapa sawit dan teh, penguasaan lahan didominasi oleh perkebunan besar, masing-masing 59,7% dan 53,4%. Pada perkebunan teh penguasaan lahan oleh perusahaan swasta relatif sama dengan perusahaan negara, yaitu masing-masing 24,6% dan 28,8%. Sedangkan pada perkebunan tebu, meskipun perkebunan rakyat mendominasi penguasaan lahan tetapi total lahan yang dikuasai perkebunan besar mencapai 41,2%.

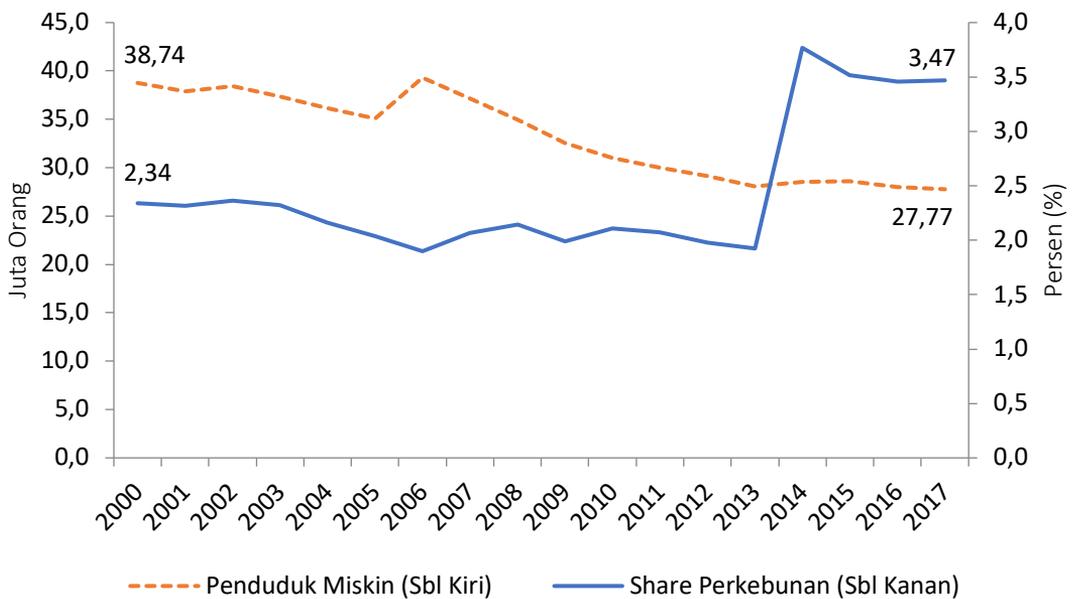
Untuk komoditas kelapa sawit, meskipun korporasi lebih dominan dalam penguasaan lahan tetapi secara nominal jumlah lahan kelapa sawit yang dikuasai pekebun masih lebih besar dibanding luas lahan yang dikuasai pekebun untuk masing-masing komoditas strategis unggulan nasional perkebunan lainnya. Luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 4,54 juta hektar atau 29,16 % dari total lahan yang digunakan untuk mengusahakan 11 komoditas perkebunan rakyat unggulan strategis nasional (15,55 juta hektar). Pada periode 2001-2016 (selama 15 tahun), luas total lahan untuk 11 komoditas strategis unggulan nasional perkebunan masih terus tumbuh. Selama periode tersebut luas lahan usaha perkebunan dimaksud meningkat 2,92% per tahun, yaitu dari 14.865.843 hektar pada tahun 2000 menjadi 23.207.590 hektar pada tahun 2015. Peningkatan terbesar terjadi pada lahan yang dikelola oleh Perkebunan Besar Swasta (4,94%/tahun), kemudian disusul oleh lahan yang dikelola para pekebun atau perkebunan rakyat (2,38%/tahun), kemudian peningkatan luas lahan paling kecil terjadi pada luas lahan yang dikelola oleh Perkebunan Besar Negara (0,62%, tahun).

Sebagaimana perkembangan luas lahan usaha perkebunan, perkembangan produksi pun meningkat pesat. Produksi kelapa sawit meningkat dari 7.000.508 ton pada tahun 2000 menjadi 31.070.015 ton pada tahun 2015 atau dalam kurun waktu 15 tahun meningkat sebesar 8,43%/tahun. Kenaikan produksi perkebunan lain yang relatif besar adalah cengkeh (5,33%/tahun), karet (4,72%/tahun), jambu mete (4,35%/tahun), tebu (2,57%/tahun), dan kakao (2,26%/tahun). Kecuali pada kopi, prosentasi kenaikan-kenaikan tersebut umumnya lebih tinggi terjadi pada produksi perkebunan rakyat dibanding pada produksi perusahaan perkebunan besar (swasta maupun negara). Sementara itu, kenaikan produksi lada dan kopi relatif rendah, yaitu masing-masing hanya 1,1%/tahun dan 0,95%/tahun. Bahkan untuk produksi kapas; teh; dan kelapa pertumbuhan produksinya bernilai negatif (menurun), yaitu masing-masing -8,8%/tahun; -1,25%/tahun; dan 0,28%/tahun. Prosentasi penurunan produksi yang besar umumnya terjadi pada perusahaan perkebunan besar negara, terutama pada usaha kelapa (-7,58%/tahun); kakao (- 6,66%/ tahun); teh (- 3,83%/tahun); dan kopi (- 2,71%/tahun).



Sejalan dengan itu, pada tahun 2015 jumlah pekebun terbanyak adalah mereka yang mengusahakan komoditas kelapa, yaitu mencapai 6,6 juta kepala keluarga (KK) atau 37,31% dari total pekebun yang mengusahakan 11 komoditas strategis unggulan nasional perkebunan yang jumlahnya mencapai 17,4 juta KK. Meskipun pada tahun 2015 total luas lahan yang diusahakan oleh pekebun kelapa sawit paling besar, tetapi jumlah pekebun yang mengelola komoditas kelapa sawit hanya 2,2 juta kepala keluarga atau 12,32% dari total jumlah pekebun yang mengusahakan 11 komoditas strategis unggulan nasional perkebunan.

Salah satu indikator kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah dapat dilihat dari ketercapaian tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan antara lain terlihat dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2000 – 2017 cukup menggembirakan dan cenderung berkembang dengan baik. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1.1 yaitu rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35% serta adanya peningkatan pendapatan perkapita tetapi untuk periode yang sama terlihat ada perkembangan menurunnya persentase penduduk miskin.

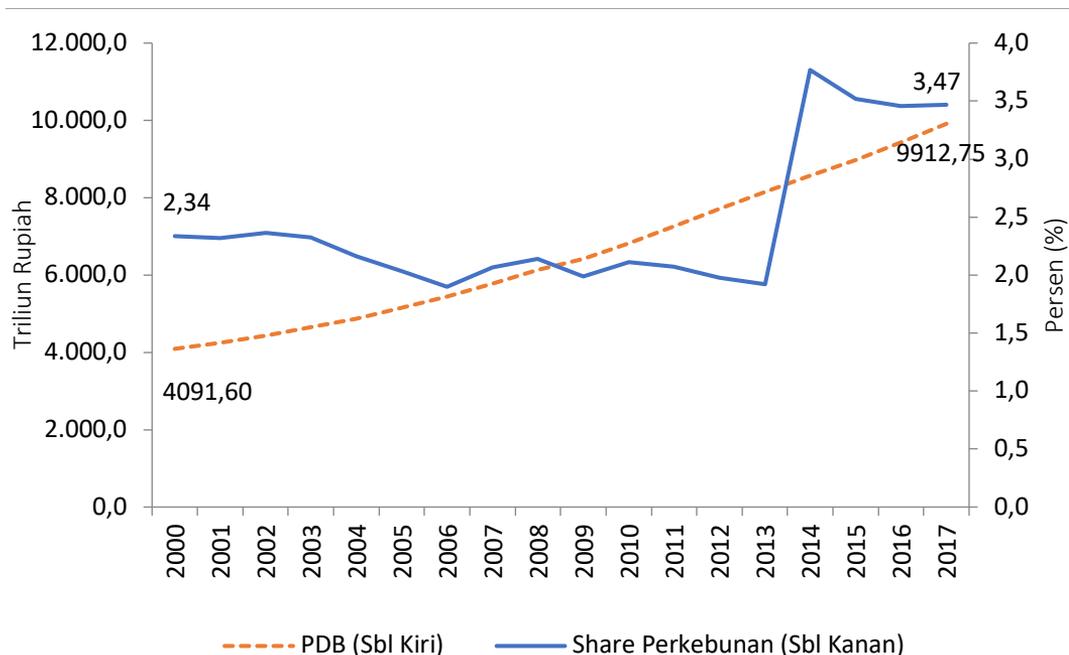


Gambar 1. 1 Perkembangan Kemiskinan dan Share Perkebunan Indonesia tahun 2000 - 2017

BAB I PENDAHULUAN

Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa membaiknya perekonomian di Indonesia. Selanjutnya menimbulkan pertanyaan bagaimana peran pembangunan perkebunan terhadap pencapaian tersebut. Untuk mengetahui bagaimana peran perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka dilakukan analisis dampak ekonomi perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan pengurangan kemiskinan secara partial pada level nasional dan menurut wilayah (provinsi).

Selama kurun waktu 2000 – 2017, terlihat PDB cenderung tumbuh, sedangkan kontribusi subsektor perkebunan cenderung stabil. Kontribusi Subsektor perkebunan mulai terlihat meningkat setelah tahun 2013, namun peningkatan kontribusi subsektor perkebunan ini tidak signifikan mendorong kenaikan PDB.



Gambar 1.2 Perkembangan PDB dan Share Perkebunan Indonesia, 2000 – 2017



Selanjutnya, Untuk mengukur dampak pembangunan perkebunan (yang diukur menggunakan *share* subsektor perkebunan) terhadap pertumbuhan ekonomi (didekati dengan pertumbuhan PDB menggunakan model regresi sederhana). Model regresi sederhana yang dibangun, sebagai berikut:

$$\text{LnPDB}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Share}_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

LnPDB_i : Logaritma natural PDB Tahun ke-i (i=2000, 2001, ..., 2017)

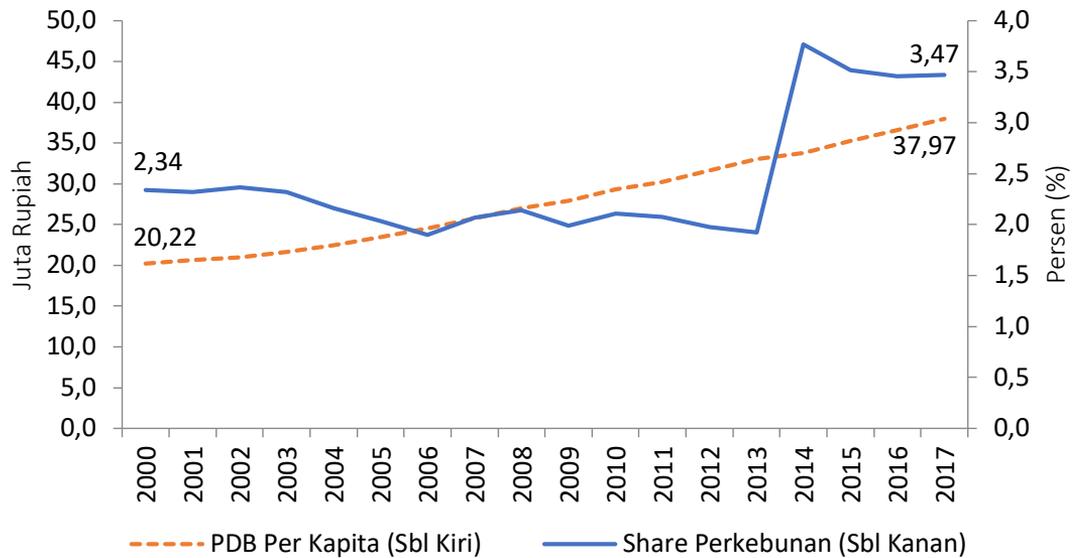
Share_i : Kontribusi subsektor perkebunan Tahun ke-i (i=2000, 2001, ..., 2017)

β : Koefisien persamaan regresi

ε_i : Sisaan disebabkan kesalahan pengukuran

Hasil estimasi koefisien *share* persamaan regresi di atas diperoleh sebesar 0,26. Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas perubahan kontribusi subsektor perkebunan terhadap peningkatan PDB sebesar 0,26. Hasil ini mengartikan bahwa setiap peningkatan 1% kontribusi subsektor perkebunan akan dapat meningkatkan PDB sebesar 0,26% dari nilai sebelumnya. Namun perlu hati-hati memahami hasil di atas, karena koefisien diterminasi (R²) sebesar 33,1%, dimana nilai ini relatif kecil. Berdasarkan nilai koefisien diterminasi ini menunjukkan bahwa masih ada variabel atau faktor lain yang memengaruhi variasi perubahan PDB sebesar 66,9%. Dengan perkataan, dalam melakukan proyeksi PDB perlu melibatkan variabel lain bersama-sama dengan *share* subsektor perkebunan.

Pencapaian pembangunan nasional dapat juga diukur berdasarkan perkembangan pendapatan per kapita. Seirama dengan perkembangan PDB, periode 2000 – 2017, pendapatan per kapita yang diukur dengan PDB per kapita menunjukkan tren yang meningkat (Gambar 3). Pada Tahun 2000, PDB Per kapita (adh konstan 2010) sebesar Rp.20,22 Juta meningkat menjadi Rp.37,97 Juta atau meningkat 5,16% per tahun.



Gambar 1.3. Perkembangan PDB Per Kapita dan Share Perkebunan, 2000 – 2017

Sama halnya dengan bagian sebelumnya, untuk mengukur dampak pembangunan perkebunan (yang diukur menggunakan *share* subsektor perkebunan) terhadap pendapatan per kapita (didekati dengan PDB per kapita) menggunakan model regresi sederhana. Model regresi sederhana yang dibangun, sebagai berikut:

$$\ln \text{Perkapita}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Share}_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$\ln \text{Perkapita}_i$: Logaritma natural PDB Tahun ke-*i* (*i*=2000, 2001, ..., 2017)

Share_i : Kontribusi subsektor perkebunan Tahun ke-*i* (*i*=2000, 2001, ..., 2017)

β_i : Koefisien persamaan regresi

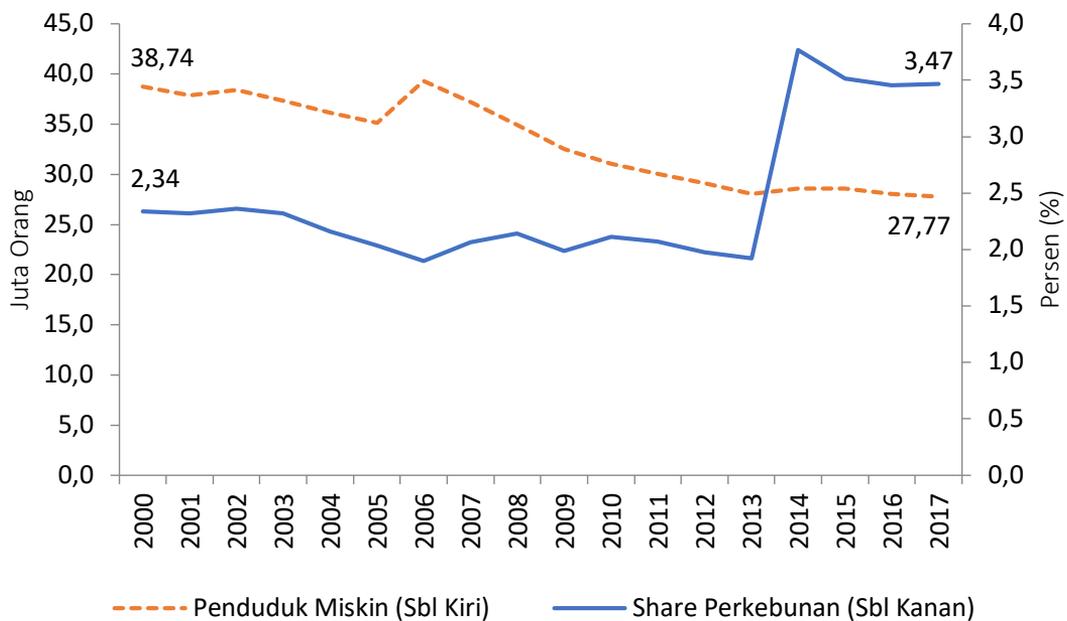
ε_i : Sisaan disebabkan kesalahan pengukuran

Hasil estimasi koefisien *share* persamaan regresi di atas diperoleh sebesar 0,19. Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas perubahan kontribusi subsektor perkebunan terhadap peningkatan PDB per kapita sebesar 0,19. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% kontribusi subsektor perkebunan akan dapat meningkatkan PDB per kapita sebesar 0,19% dari nilai sebelumnya. Namun hasil temuan ini juga menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang memengaruhi perubahan PDB per kapita. Nilai koefisien determinasi (*R*²) sebesar 31,8%. Artinya, masih ada variabel atau faktor lain yang memengaruhi variasi perubahan PDB sebesar 68,2%.



Memperhatikan kedua hasil diatas (dampak kontribusi *share* subsektor perkebunan terhadap PDB dan PDB per kapita), terlihat bahwa bahwa perubahan *share* subsektor perkebunan lebih elastis terhadap PDB dibandingkan dengan pendapatan perkapita. Fenomena ini dapat terjadi dikarenakan nilai tambah subsektor perkebunan lebih didominasi oleh perkebunan besar dibandingkan dengan perkebunan rakyat.

Pada periode 2000-2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 38,74 juta orang tahun 2000 menjadi 27,77 juta tahun 2015 orang dengan rata-rata penurunan sekitar 1,67 juta orang setiap tahun. Sementara itu, kontribusi subsektor perkebunan terlihat stabil dari tahun ke tahun berkisar 2-4%. Jadi, kemiskinan secara makro menunjukkan kecenderungan menurun, namun belum dapat sepenuhnya menjelaskan peran subsektor perkebunan dalam pengurangan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dampak kontribusi subsektor perkebunan terhadap kemiskinan menggunakan metode regresi sederhana.



Gambar 1. 4 Perkembangan Kemiskinan dan Share Perkebunan Indonesia, 2000 – 2017

Untuk mengukur dampak pembangunan perkebunan (yang diukur menggunakan *share* subsektor perkebunan) terhadap kemiskinan (didekati jumlah penduduk miskin) menggunakan model regresi sederhana. Model regresi sederhana yang dibangun, sebagai berikut:

$$\text{LnMiskin}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Share}_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

LnMiskin_i : Logaritma natural PDB Tahun ke-i (i=2000, 2001, ..., 2017)

Share_i : Kontribusi subsektor perkebunan Tahun ke-i (i=2000, 2001, ..., 2017)

β_i : Koefisien persamaan regresi

ε_i : Sisaan disebabkan kesalahan pengukuran

Hasil estimasi koefisien *share* persamaan regresi di atas diperoleh sebesar -0,11. Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas perubahan kontribusi subsektor perkebunan terhadap peningkatan PDB sebesar -0,11 (elastisitas negatif). Hasil ini mengartikan bahwa setiap peningkatan 1% kontribusi subsektor perkebunan akan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,11% dari nilai sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penurunan kemiskinan di luar kontribusi subsektor perkebunan masih relatif banyak sebesar 72,6%.

1.1.1 Kinerja Pendanaan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019

1.1.1.1 Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa capaian pertumbuhan PDB selama 2014-2018 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan menunjukkan pola pertumbuhan yang positif. Berdasarkan lapangan usaha, keterlibatan tenaga kerja perkebunan masih menunjukkan pertumbuhan positif. Rata-rata penyerapan tenaga kerja selama 2014-2018 adalah 22,9 juta orang per tahun dengan pertumbuhan sebesar 1,94%. Kemampuan subsektor perkebunan dalam menarik minat tenaga kerja sebagian besar dipengaruhi penyerapan tenaga kerja dari komoditas kelapa sawit yang memberikan potensi ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat perkebun.



Tabel 1.1 Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Capaian makro per tahun					Laju Pertumb. (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pertumbuhan PDB (Rp. Milyar)						
	a. Harga Berlaku	398.261	405.292	428.783	471.308	489.249	5,32
	b. Harga Konstan 2010	338.502	345.165	357.138	373.054	387.502	3,44
2	Tenaga Kerja (juta orang)						
	a. Keterlibatan	22,16	22,36	22,33	23,80	23,97	2,02
3	Ekspor						
	a. Volume (ribu ton)						
	b. Nilai (US\$ milyar)	26,78	23,93	22,11	28,07	24,54	-0,97
4	Impor						
	a. Volume (ribu ton)						
	b. Nilai (US\$ milyar)	3,94	3,21	4,26	4,96	5,07	8,22
5	Investasi (Rp. Triliun)						
6	Neraca Perdagangan Perkebunan (US\$ milyar)	22,84	20,72	17,85	23,11	19,47	-2,35
7	NTP Perkebunan Rakyat	101,3	97,18	97,86	98,91	97,62	-0,9
8	Penerimaan Negara Lainnya (Rp. Milyar)						
	a. Cukai Hasil Tembakau	2.214,00	2.411,10	2.796,40	2.997,60	2.964,60	7,74
	b. Bea Keluar CPO dan turunannya						
	c. Bea Keluar Biji Kakao						

Peningkatan laju pertumbuhan cukai hasil tembakau mengindikasikan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia pada komoditas tembakau (sebagian besar kebutuhan turunannya berupa rokok) baik kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. Industri Hasil Tembakau memiliki sumbangan yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja yang merupakan salah satu objek sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

Impor komoditas perkebunan masih membanjiri pasar dalam negeri dengan peningkatan pertumbuhan yaitu 8,2% dari sisi nilai. Hal ini menjelaskan bahwa produsen nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dan ketersediaan produk perkebunan olahan di dalam negeri baik dalam hal volume, kualitas dan daya saing harga. Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya meningkatkan pengembangan komoditas ekspor perkebunan melalui fasilitasi anggaran dan regulasi tetapi perlu didukung oleh Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan perkebunan lainnya. Peran Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sangat besar.

1.1.1.2 Kinerja Mikro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019

Capaian luas areal komoditas perkebunan sampai dengan tahun 2018 berfluktuasi tetapi sebagian besar menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Sampai dengan tahun 2018, berdasarkan analisis perhitungan bahwa luas areal 16 komoditas perkebunan rata-rata tumbuh sebesar 4,45%. Berikut ini adalah kinerja mikro pembangunan yang telah dicapai dalam upayanya mengembangkan komoditas perkebunan selama tahun 2014-2018 yang disajikan pada Tabel 1.2 dibawah ini:



Tabel 1.2 Kinerja Luas Areal Komoditas Perkebunan tahun 2014-2018

Komoditas	Capaian luas areal (hektar) per tahun					Laju Pertumb. (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
 Karet	3.606.245	3.621.102	3.639.048	3.659.090	3.671.387	0,45
 Kelapa Sawit	10.754.801	11.260.277	11.201.465	14.048.722	14.386.350	7,89
 Kelapa	3.609.812	3.585.599	3.653.745	3.473.230	3.417.951	-1,33
 Kopi	1.230.495	1.230.001	1.246.657	1.238.598	1.252.825	0,45
 Kakao	1.727.437	1.709.284	1.720.773	1.658.421	1.611.014	-1,72
 Jambu Mete	531.154	522.863	514.491	506.752	494.268	-1,78
 Lada	162.751	167.590	181.390	186.297	187.291	3,61
 Cengkeh	510.174	535.694	545.027	559.566	569.052	2,78
 Teh	118.899	114.891	113.617	113.307	109.936	-1,93
 Kemiri Sunan	1.062	1.135	1.645	1.725	1.730	14,24
 Tebu	478.108	454.171	445.075	430.363	429.959	-2,60
 Kapas	3.670	6.118	4.600	3.596	5.162	15,90
 Tembakau	215.865	209.095	155.950	201.909	204.509	0,55
 Nilam	20.714	18.626	19.612	20.508	21.351	0,07
 Sagu	135.484	196.415	185.494	306.805	311.954	26,62
 Pala	158.326	168.904	178.333	196.868	229.139	9,76

Trend pertumbuhan luas areal tertinggi dicapai oleh komoditas utama kelapa sawit yang berada di atas 7,89%. Komoditas kelapa sawit masih menjadi daya tarik pekebun dalam meningkatkan luas areal termasuk bukaan baru, terlebih banyaknya perusahaan perkebunan swasta yang berinvestasi untuk penanaman kelapa sawit. Kontribusi ekonomi cukup menarik pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan luas areal pengembangannya walaupun fasilitasi Direktorat Jenderal Perkebunan hanya terbatas pada kegiatan **dukungan legalitas dan perizinan usaha perkebunan** karena adanya pelimpahan tupoksi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain komoditas kelapa sawit, komoditas perkebunan lainnya yang berorientasi ekspor juga menunjukkan pola pertumbuhan positif seperti karet, kopi, lada, cengkeh, kapas, dan pala. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, komoditas kelapa, kakao, jambu mete, teh, tebu dan nilam menunjukkan pola negatif. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya penurunan luas areal komoditas-komoditas tersebut, salah satu diantaranya adalah **konversi ke komoditas lain yang lebih ekonomis**.



Tabel 1.3 Kinerja Produksi Komoditas Perkebunan tahun 2014-2018

Komoditas	Capaian produksi (ton) per tahun					Laju Pertumb. (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
 Karet (karet kering)	3.153.186	3.145.398	3.357.951	3.680.428	3.630.357	3,69
 Kelapa Sawit (CPO)	29.278.189	31.070.015	31.730.961	37.965.224	41.883.631	10,21
 Kelapa (kopra)	3.005.916	2.920.665	2.904.170	2.854.300	2.840.148	-1,40
 Kopi (kopi berasan)	643.857	639.412	663.871	717.962	756.051	4,15
 Kakao (biji kering)	728.414	593.331	658.399	590.684	767.280	3,01
 Jambu Mete (gelondong kering)	131.302	137.580	137.094	135.569	147.647	3,06
 Lada (lada kering)	87.448	81.501	86.334	87.991	88.235	0,33
 Cengkeh (bunga kering)	122.134	139.642	139.611	113.178	131.014	2,78
 Teh (daun kering)	154.369	132.615	138.935	146.251	140.236	-2,04
 Kemiri Sunan (biji kering)	3	6,31	6,91	1,9	3,150	36,18
 Tebu (gula)	2.579.173	2.497.997	2.204.619	2.121.671	2.170.948	-4,04
 Kapas (serat berbiji)	761	759	932	332	353	-8,87
 Tembakau (daun kering)	198.301	193.790	126.728	181.142	195.482	3,49
 Nilam (minyak nilam)	2.103	1.986	2.192	2.207	2.100	0,16
 Sagu (tepung sagu)	310.656	423.946	383.613	432.913	463.542	11,72
 Pala (biji kering)	32.729	33.711	33.305	32.842	44.100	8,67

Tabel 1.3 menunjukkan capaian produksi komoditas perkebunan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan analisis perhitungan, pertumbuhan produksi 16 komoditas perkebunan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tumbuh cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 2,57%. Perkembangan produksi komoditas perkebunan umumnya di dorong oleh kondisi pasar yang kondusif, di samping komitmen pemerintah dan pelaku usaha yang turut berkontribusi dalam mengembangkan komoditas tersebut.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Secara umum, usaha perkebunan strategis nasional dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul daerah saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat, dan menguasai lahan yang luasnya mencapai 15,55 juta hektar. Akan tetapi **produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah**, seperti produktivitas kopi yang hanya 0,78 ton/ha; kakao 0,80 ton/ha, karet 1,2 ton/ha ; sawit 3,1 ton/ha. Hal ini terjadi diantaranya akibat tanaman tua, benih asalan, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) yang masih rendah. Produktivitas dan Potensi Produksi komoditas Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 1.4.



Tabel 1.4 Luas areal per petani, persen TBM, dan produktivitas 11 komoditas perkebunan

Komoditi	Ha/ Petani	% TBM	Protas Ton/Ha	Potensi Produktivitas		% Potensi Protas
				Ton/Ha	Varietas	
 Kelapa Sawit	2,25	21,93	3,231	39,0	DxP Yangambi	8,29
 Kopi	0,71	11,58	1,417	1,6	BP 358	90,24
 Kakao	0,97	21,87	0,798	2,8	Sulawesi 2	29,03
 Karet	1,38	12,55	1,043	2,2	RRIC 100	47,87
 Kelapa	0,53	16,46	1,110	3,6	Sawarna	31,02
 Lada	0,62	30,19	0,803	4,5	Petaling 1	17,91
 Pala	0,85	52,15	0,464	6,0	Ternate 1	7,73
 Cengkeh	0,51	25,57	0,428	6,0	Zanzibar Gorontalo	7,13
 Tebu	0,36	0,00	4,816	14,5	PS 921	33,19
 Teh	0,47	6,52	1,401	2,2	GMBS 2	65,11
 Jambu Mete	0,71	22,07	0,431	1,2	SM 9	36,64

Bersamaan dengan itu, luas areal kebun rakyat yang perlu diremajakan/ direhabilitasi karena tanamannya sudah tua dan/atau rusak sangat luas, yaitu mencapai 1,742 Juta ha atau 11,2% dari luas perkebunan rakyat strategis nasional. Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman perkebunan, bibit atau bahan tanam merupakan pintu masuk yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun. Kesalahan penggunaan bahan tanam akan menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, penyediaan bahan tanam merupakan prioritas pembangunan perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan penyediaan input produksi lain; modal finansial; serta peningkatan SDM petani (jumlah dan kapabilitas).

Untuk memenuhi program peremajaan dan/atau rehabilitasi kebun rakyat tersebut, jumlah benih benih yang diperlukan lebih dari 1 (satu) milyar batang. Tentunya benih yang disediakan harus merupakan benih yang bermutu, yaitu baik dan benar. Dengan demikian, dalam penyediaan benih tersebut selain kegiatan produksi harus didukung oleh kegiatan sertifikasi dan pengawasan yang kuat yang dijalankan sejak proses produksi; distribusi; dan penggunaan di lapangan. Fasilitasi penyediaan bibit untuk para petani semakin penting dilakukan oleh program pemerintah mengingat sebagian besar pekebun merupakan petani kecil yang sebagian besar hanya mengelola kebun kurang dari satu hektar. Dengan luasan kebun sebesar tersebut, umumnya para petani tidak memiliki surplus yang cukup untuk membiayai peremajaan kebun. Sebagian besar penghasilan mereka hanya diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Untuk melaksanakan program pembangunan perkebunan dengan baik, khususnya program logistic benih perkebunan, beberapa kondisi saat ini yang perlu dibenahi adalah:

- a. Lokasi penyedia benih jauh dari lokasi pengembangan komoditas pekebunan;
- b. Ketersediaan benih unggul dengan produktivitas tinggi terbatas,
- c. Mutu benih masih rendah,
- d. Resiko benih rusak dan biaya transportasi benih mahal akibat pengangkutan jarak jauh.

Perbaikan kondisi tersebut adalah untuk mencapai kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan, yaitu:

- a. Penyediaan benih tanaman perkebunan unggul (bermutu dan produktivitas tinggi) berada pada lokasi kawasan pengembangan komoditas perkebunan,
- b. Membangun kebun sumber benih dan infrastruktur pembesaran benih/nursery di lokasi kawasan pengembangan komoditas perkebunan.



1.2.1 Potensi Pembangunan Perkebunan

Pembangunan perkebunan kedepan akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut ini akan dijabarkan beberapa potensi pembangunan perkebunan yang secara umum berkaitan dengan kondisi sumber daya alam, lahan dan air, sumber daya insani, inovasi teknologi, lingkungan, demografi, bahan baku biologi/ benih, sistem informasi manajemen, partisipasi masyarakat, semangat desentralisasi, anggaran, kelembagaan, pasar dan aspek pemerintahan/ reformasi birokrasi dalam membangun perkebunan kedepan.

1. Keanekaragaman hayati melimpah sebagai negara tropis

Kondisi alam Indonesia merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dapat dieksplorasi untuk menjadi modal penting pembangunan perkebunan. Sebagai negara tropis maka Indonesia secara alami merupakan kawasan dengan efektivitas dan produktivitas yang tinggi dalam pemanenan dan transformasi energi matahari menjadi *bio-massa* dan *feedstock bio-industry*. Kondisi ini juga dapat menjadi basis keunggulan kompetitif dalam *bio-economic*. *Bio-economic* adalah semua aktivitas ekonomi yang menggunakan sumberdaya hayati untuk menghasilkan bahan kimiawi, material dan bahan bakar nabati untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Indonesia juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beragam untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersediaan tanah, hara, dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme serta setidaknya memiliki 47 ekosistem alami yang berbeda.

2. Pengembangan bio-economic

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dalam bentuk komoditas pangan dan perkebunan sebagai sumber pemanfaatan bio-economic. *Bio-economic* mengacu pada semua aktivitas ekonomi menggunakan sumberdaya hayati untuk menghasilkan bahan kimiawi, material dan bahan bakar nabati untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan *bio-economic* dipacu oleh semakin tingginya tuntutan atas produk pangan berkualitas termasuk *functional food*.

Bio-economic berbasis dari pemanfaatan dan pengembangan pemanenan energi matahari melalui proses hayati. Keunggulan **alam tropika** dalam penyediaan proses hayati dalam **pemanenan energi matahari** harus dimanfaatkan sebesar-besarnya.

3. Peningkatan permintaan dunia terhadap 4F Crops (Food, Feed, Fiber and Fuel)

Indonesia memiliki peluang yang sangat besar karena keunggulan komparatif Indonesia sebagai negara agraris dan memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, selain itu komoditas unggulan perkebunan yang dapat ditanam diberbagai kondisi. Tetapi, untuk menjadikan komoditas unggulan perkebunan ini unggul secara kompetitif maka diperlukan penanganan yang baik seperti budidaya yang baik dan ramah lingkungan, penanganan pascapanen serta penggunaan benih unggul dan sarana produksi yang berkualitas.

Komoditas perkebunan di Indonesia memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan manusia (*food*), sumber pakan ternak (*feed*), kebutuhan serat pangan (*fiber*) untuk pupuk organik dan bahan bakar *bio-massa* dan kebutuhan minyak nabati (*fuel*) untuk kebutuhan bahan bakar nabati (BBN). Peluang ini perlu dimanfaatkan karena semakin tingginya permintaan dunia akan produk 4F Crops yang ramah lingkungan sebagai implikasi dari menipisnya cadangan fosil didunia. Kedepan pemanfaatan komoditas perkebunan sebagai sumber 4F Crops akan bertransformasi kedalam pemanfaatan komoditas/produk sebagai sumber 4-bio-F Crops (*bio-food, bio-feed, bio-fiber dan bio-fuel*).

4. Kecenderungan baru penghargaan atas jasa lingkungan dan jasa amenity

Lahan perkebunan tidak hanya penghasil bahan makanan, serat dan energi tetapi juga mempunyai multifungsi yang menghasilkan jasa lingkungan dan jasa *amenity*. Jasa lingkungan dan jasa *amenity* lahan perkebunan antara lain penyedia sumber air tanah dan oksigen, pengendali banjir, pencegah erosi/ longsor dan sedimentasi, mempertahankan suhu udara, mendaur ulang limbah, menjaga kualitas udara/ purifikasi, pengatur tata air dan menjaga keberadaan sumber daya air, memitigasi perubahan iklim, sumber keindahan dan kenyamanan, pelestari keanekaragaman hayati, pelestari budaya pedesaan, dan sebagainya.

Nilai manfaat jasa lingkungan dan *amenity* lahan perkebunan sudah mempunyai pasar, dan ini dapat dilihat dari berkembangnya beragam *eco-tourism* atau wisata alam di wilayah perkebunan dengan harga jual yang kompetitif. Berbagai jasa pariwisata ke kawasan sentra perkebunan (misalnya perkebunan teh) yang memberi pengunjung keindahan areal perkebunan serta kesempatan merasakan kehidupan pekebun telah berkembang sebagai paket pariwisata yang ditawarkan berbagai *resort* wisata. Selain



itu, jasa-jasa *amenity* yang lain adalah dipergunakannya sentra-sentra pengembangan komoditas perkebunan baik model pengembangan maupun kawasan budidaya sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pelatihan di kalangan pegawai swasta, pelajar sekolah menengah, mahasiswa perguruan tinggi, para peneliti dan stakeholder lainnya.

Secara umum, berbagai praktek perkebunan bisa menghasilkan jasa lingkungan dan multifungsi yang negatif (*negative externalities*), namun sistem perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan akan memberikan *positive externalities*.

5. Perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi pertanian/ perkebunan

Perkembangan diseminasi teknologi kepada petani/pekebun lebih mudah dilakukan karena umumnya petani/pekebun tertarik kepada hal-hal yang bersifat inovatif, namun tingkat adopsi masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan dengan mengadopsi teknologi baru tidak mendapatkan insentif atau nilai tambah artinya harga yang diterima tidak berbeda jauh dengan harga produk tanpa teknologi baru. Hal lain adalah tidak adanya jaminan pasar untuk teknologi tersebut berkembang di masyarakat. Contoh adalah produk kakao yang di fermentasi dan tanpa fermentasi dengan selisih harga jual yang sangat kecil.

Perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi pertanian/ perkebunan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas pertanian/ perkebunan dan *bio-industry* spesifik lokasi melalui pengembangan sistem budidaya, perbenihan dan pascapanen dengan modal dasar lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pertanian minimal harus dapat menjawab 2 hal, pertama bagaimana teknologi dapat menjawab berbagai hal terkait dengan dampak perubahan iklim, dan yang kedua bagaimana teknologi dapat menjawab berbagai keterbatasan pada sumberdaya yang ada di tengah perkembangan kebutuhan manusia yang tanpa batas. Untuk menjawab kedua hal di atas, diperkirakan ada 3 revolusi di bidang sains yang diperlukan dan saat ini sedang terjadi di dunia, yaitu revolusi di bidang *bio-technology*, *nano-technology* dan *information-technology*.

6. Ketersediaan sumber daya lahan dan kesesuaian agro-ecosystem

Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Total luas daratan Indonesia sebesar 192 juta hektar, terbagi atas 123 juta hektar (64,6%) kawasan budidaya dan 67 juta hektar sisanya (35,4%) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya di daratan yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta hektar, meliputi lahan basah 25,6 juta hektar; lahan kering tanaman semusim 25,3 juta hektar dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Sampai saat ini dari areal yang berpotensi untuk pertanian, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta hektar sehingga masih tersisa **54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.**

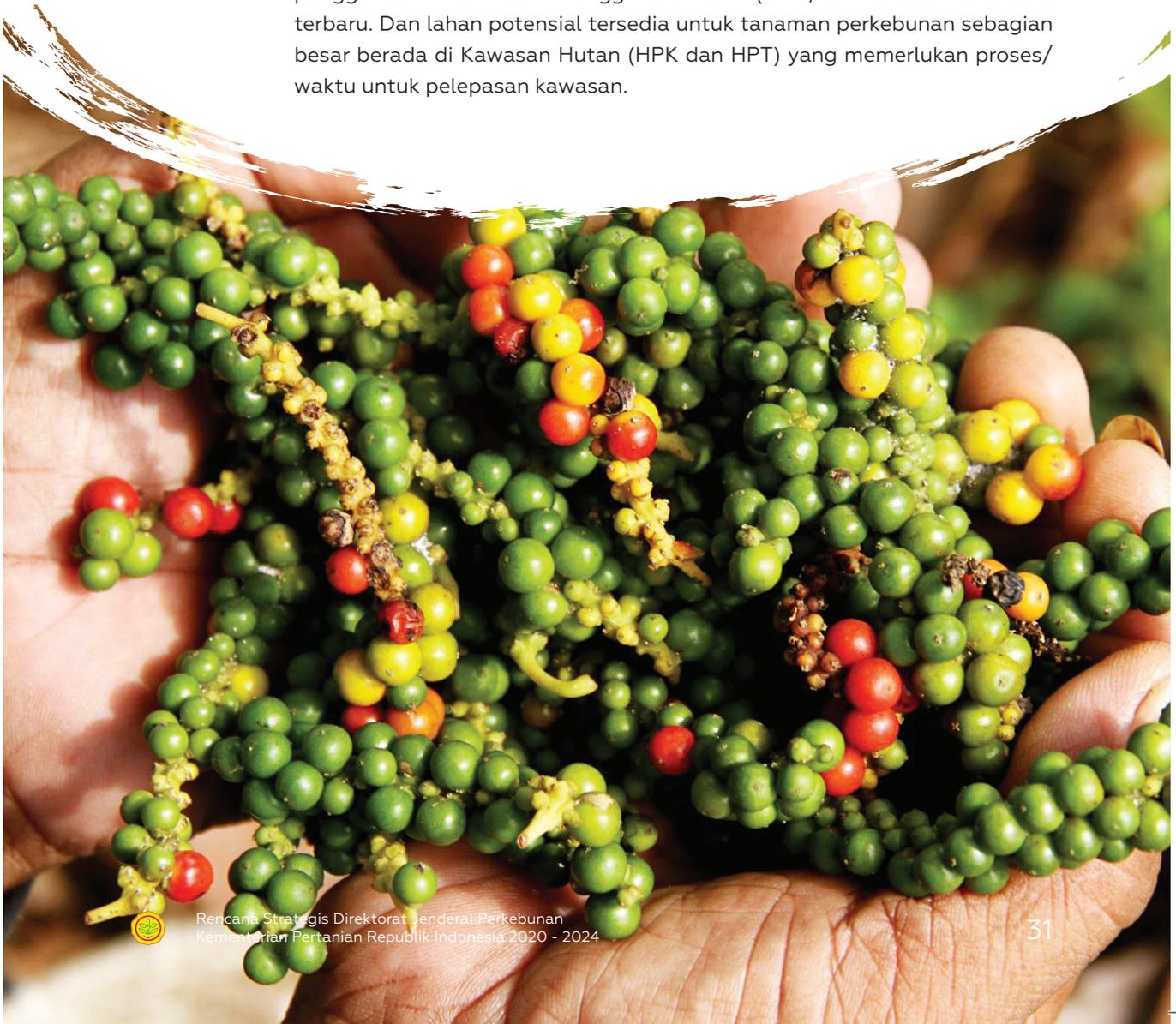
Potensi lainnya dalam pembangunan perkebunan adalah kondisi **agro-ecosystem**. Komponen *agro-ecosystem* yang meliputi kondisi geografis, penyinaran matahari, intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di beberapa wilayah dan keanekaragaman jenis tanah menjadi faktor yang sangat mendukung dan potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan. Komponen *agro-ecosystem* lainnya yaitu tanaman perkebunan selain bernilai ekonomis juga mempunyai potensi ekologis yaitu sebagai pemfiksasi CO₂ dan sebagai tanaman yang berfungsi konservasi lahan dan air. Selain itu komoditas perkebunan juga berpotensi menurunkan emisi CO₂ terutama bila komoditas perkebunan dikembangkan untuk merehabilitasi lahan semak belukar/alang-alang.

Menurut Erna, 2018, potensi indikasi pengembangan komoditas perkebunan atau disebut dengan potensial tersedia adalah lahan-lahan potensial (sesuai) secara biofisik untuk pertanian, saat ini belum dimanfaatkan untuk pertanian dan non-pertanian, berupa semak/belukar, alang-alang, lahan terlantar. Jadi, lahan potensial tersedia belum mempertimbangkan status kepemilikannya, namun telah mempertimbangkan status kawasan hutan dan status perijinan untuk perkebunan. Masih menurut sumber yang sama, secara umum penentuan kawasan perkebunan (tanaman tahunan (TT)) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kriteria umum potensi untuk komoditas tanaman tahunan termasuk buah-buahan pada lahan kering dan pada lahan rawa. Kriteria umum padalahan kering untuk tanaman tahunan antara lain: pada kelembaban tanah udik (lembab), ustik (kering), serta pada lereng 8-40%, dan berupa non pasir kuarsa. Sementara itu, parameter untuk tanaman tahunan di lahan rawa adalah kecukupan air, pirit < 2%, non pasir kuarsa, dan khusus pada lahan gambut, ketebalan < 300cm, non pasir kuarsa.



Berdasarkan kriteria diatas, diketahui bahwa ketersediaan lahan kering di Indonesia untuk tanaman tahunan adalah seluas kurang lebih 16.351.538 hektar (dari total 24.793.827 hektar di Indonesia), sedangkan potensi lahan rawa seluas 928.736 hektar (dari total 7.518.786 hektar di Indonesia) (BBSDLP, 2015). Masih pada sumber yang sama menyebutkan bahwa dari 900-an ribu hektar tersebut, yang berpotensi tersedia untuk pengembangan terdistribusi seluas 266.083 hektar di Pulau Sumatera, 475.483 hektar di Pulau Kalimantan, dan 187.170 hektar di Pulau Papua, dan 102.692 hektarnya berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).

Menurut Suryani, 2018, tantangan yang dihadapi antara lain: data potensi lahan tersedia, masih indikatif karena analisis dilakukan pada skala tinjau (1:250.000) sementara skala 1:50.000 belum seluruhnya tersedia. Data penggunaan lahan masih menggunakan BPN (2012, karena belum ada data terbaru. Dan lahan potensial tersedia untuk tanaman perkebunan sebagian besar berada di Kawasan Hutan (HPK dan HPT) yang memerlukan proses/waktu untuk pelepasan kawasan.



Kesesuaian Lahan dan Rekomendasi Pengelolaan Lahan (RPL)



Gambar 1. 5 Kesesuaian Lahan dan RPL



7. Distribusi dan aksesibilitas pemanfaatan sumber daya air

Ketersediaan sumber daya air nasional (annual water resources/AWR) masih sangat besar, terutama di wilayah barat, akan tetapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Sebaliknya di sebagian besar wilayah timur yang radiasinya melimpah dan curah hujan rendah (<1.500 mm per tahun) hanya terdistribusi selama 3-4 bulan. Total pasokan atau ketersediaan air wilayah (air permukaan dan air bumi) di seluruh Indonesia adalah 2.110 mm per tahun setara dengan 127.775 m³ per detik. Indonesia dikategorikan sebagai negara kelompok 3 berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya airnya yang membutuhkan pengembangan sumberdaya 25-100% dibanding kondisi saat ini.

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui pembangunan sumber daya air, pengembangan/ pembangunan jaringan irigasi, pembangunan/ pembangunan embung dan dam parit serta pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Pengembangan pengelolaan air di tingkat petani melalui P3A didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 79/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

8. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI)

Sebagaimana amanat dari dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 bahwa pilar penopang yang ditekankan untuk mewujudkan kokohnya fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan adalah pengembangan sumber daya insani berkualitas, modal sosial dan modal politik. SDI Indonesia begitu melimpah dan diproyeksikan akan terus bertambah. SDI ini dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif perkebunan Indonesia yang merupakan pelaksana penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai.

Pengembangan SDI perkebunan harus memperhatikan beberapa hal agar mampu meningkatkan daya saing di tataran Internasional diantaranya: 1) pendidikan dan kemampuan/skills; 2) keberadaan usia SDI yang produktif; 3) adopsi inovasi dan teknologi; 4) kreativitas; 5) peluang pelatihan, penelitian, pemberdayaan dan pendidikan; 6) migrasi tenaga kerja ke sektor lain; 7) ketimpangan pendapatan dan sosial ekonomi lainnya; 8) sosial budaya dan karakteristik SDI perkebunan; 9) ketersediaan sarana prasarana kerja dan lingkungan kerja; dan 10) aksesibilitas, konektivitas dan minat.

9. Bonus Demografi

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi” yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labour supply*), tabungan (*saving*) dan kualitas sumber daya insani (*human capital*).

Penduduk usia produktif Indonesia menyumbang 38% dari total penduduk produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja di Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerja menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

10. Perkembangan struktur, perilaku dan kinerja pasar

Perdagangan komoditas perkebunan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, terutama didorong oleh peningkatan rasio pendapatan masyarakat, peningkatan jumlah penduduk, adanya dukungan regulasi dan akses pasar yang semakin terbuka. Peningkatan tersebut terutama didominasi oleh perdagangan produk olahan komoditas perkebunan baik yang ditujukan untuk ekspor maupun kebutuhan dalam negeri.

Dominasi perusahaan besar dalam perdagangan produk/ komoditas perkebunan olahan di Indonesia sulit dihindari. Untuk itu perlu adanya upaya yang sistematis memanfaatkan keberadaan perusahaan multi-nasional ini dalam membawa produk perkebunan olahan Indonesia ke pasar global contohnya dalam bentuk kerjasama dan kemitraan. Untuk mendorong terjadinya kerjasama dan kemitraan diperlukan kebijakan sistematis untuk memperkuat kelembagaan petani/pekebun sehingga mampu bermitra dengan para pelaku usaha yang lebih kuat. Selain itu, inovasi dan pemanfaatan teknologi perlu terus didorong untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing usaha tani skala kecil.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian/ perkebunan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian/ perkebunan Indonesia.



Pada tahun 2015, kesepakatan ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN akan terealisasi. Pilar utama dalam *Asean Economic Community* (AEC) adalah mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal yang didukung dengan aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang lebih bebas.

Jika dilihat dari sisi potensi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu emerging country yang saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi ASEAN. Prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan karena didukung oleh melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya insani, pertumbuhan ekspor komoditas dan iklim investasi yang makin kondusif serta berkembangnya struktur, perilaku dan kinerja pasar domestik.

11. Momentum gerakan desentralisasi pemerintahan

Pemanfaatan momentum gerakan desentralisasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi peluang besar bagi pembangunan perkebunan apabila diarahkan untuk pengembangan sistem politik perkebunan yang digerakkan oleh/dan berorientasi pada pekebun/petani kecil.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2000, telah terjadi beberapa perubahan penting yang berkaitan dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah yang sebelumnya sangat dominan, saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan pertanian/ perkebunan. Pembangunan pertanian/ perkebunan pada era otonomi daerah lebih mengandalkan kreativitas rakyat/ masyarakat pekebun di setiap daerah.

12. Partisipasi masyarakat pekebun

Pembangunan perkebunan pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha sedangkan fungsi pemerintah lebih bersifat fasilitator, pembinaan dan pendampingan. Terwujudnya peran masyarakat, pekebun dan dunia usaha pada pembangunan perkebunan yang sinergi di semua tingkatan perlu didorong secara maksimal. Untuk itu ditempuh upaya terencana melalui konsultasi, koordinasi dan pengembangan jejaring kerja yang baik dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Paradigma pembangunan pada era otonomi daerah memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang secara dinamik dan kreatif didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan sehingga terjadi perimbangan

kekuasaan (*power sharing*) antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mengendalikan hak pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang cenderung berpihak kepada pengusaha dengan anggapan bahwa kelompok pengusaha memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan nasional.

Pemberdayaan masyarakat pekebun berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat pekebun. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat pekebun dapat dilihat dari beberapa sisi pandang: pertama, menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan masyarakat pekebun berkembang; kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat pekebun dalam membangun melalui berbagai pemberian bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah; ketiga, melindungi melalui keberpihakan kepada yang lemah untuk mencegah berlangsungnya persaingan yang tidak seimbang, namun sebaliknya diupayakan menciptakan kemitraan perkebunan yang saling menguntungkan.

13. Dinamika tata kelola dan reformasi birokrasi

Kebijakan reformasi birokrasi secara nasional telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang menyebutkan “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”. Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah (1) modernisasi manajemen kepegawaian, (2) restrukturisasi, *downsizing* dan *rightsizing*, perubahan manajemen dan organisasi, (3) rekayasa proses administrasi pemerintahan, (4) anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, serta (5) hubungan baru yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Kebijakan reformasi birokrasi yang digariskan pemerintah diharapkan akan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sasaran ideal yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas



korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

1.2.2 Tantangan Pembangunan Perkebunan

Berikut ini dapat diklasifikasikan tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan kedepan dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar global.

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya)

Tantangan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perkebunan kedepan adalah yang terkait hasil pertemuan WTO-Konferensi Tingkat Menteri ke-9 pada bulan Desember 2013 di Bali yaitu munculnya kesepakatan paket pertanian (proteksi dan subsidi), *Least Developed Countries* (LDCs) atau fasilitasi perdagangan bagi negara miskin) dan fasilitasi perdagangan (kapasitas pelayanan, *finance* dan transfer teknologi). Di bidang keamanan pangan (*food security*), terdapat pertentangan dari kelompok negara maju dan kelompok grup negara berkembang tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan perdagangan bebas di sektor pertanian dan ketahanan pangan seperti penentuan tarif impor dan subsidi ekspor. Kesepakatan utama lainnya meliputi penyederhanaan prosedur kepabeanan yang menghambat perdagangan dan fasilitasi perdagangan untuk mempermudah akses ekspor negara-negara miskin ke pasar negara maju. Kesepakatan tentang keamanan pangan memberikan jeda kepada negara berkembang menggelontorkan subsidi pangan melebihi 10% dari output sesuai ketentuan WTO dimana pelanggaran tersebut berlaku untuk 4 tahun. Dengan pelanggaran ini, pemerintah negara berkembang boleh membeli produk pangan dari petani di atas harga pasar dan menjualnya dengan harga terjangkau untuk melindungi penduduk miskin.

Selain itu, hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC *Economic Leaders Meeting* pada bulan November 2014 di Beijing, Tiongkok, juga menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan pertanian khususnya subsektor perkebunan di Indonesia.

Pada pertemuan KTT G20 (*G20 Leaders Summit*), bulan November 2014 di Brisbane, Australia, terdapat 3 topik utama pembahasan yang akan mewarnai pembangunan perkebunan kedepan, yaitu:

- a. penguatan sektor swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dengan tekanan pada pembukaan lapangan kerja dan perdagangan terbuka,

- b. memperkuat posisi ekonomi dunia terhadap tantangan pada masa depan
- c. bagaimana menopang institusi global.

2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015)

Kondisi global semakin meningkatkan persaingan di pasar domestik dan dunia akan mendorong bangkitnya kesadaran regionalisasi dan integrasi ekonomi. Salah satu contoh regionalisasi dan integrasi adalah terbentuknya Komunitas ASEAN yang memiliki 3 pilar utama, yaitu: *ASEAN Security Community*, *ASEAN Economic Community* and *ASEAN Socio-Cultural Community*. Terbentuknya *Asean Economic Community* (AEC) mengukuhkan terbentuknya pasar tunggal ASEAN. Manfaat dari peluang dan tantangan adanya AEC sejatinya akan diperoleh secara optimal apabila syarat dasar proses integrasi ekonomi dapat tercapai sehingga butuh kesiapan subsektor perkebunan menghadapi AEC 2015 atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jika subsektor perkebunan tidak memiliki kesiapan tersebut maka akan berimplikasi negatif terhadap pembangunan perkebunan.

Pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002. Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi.

3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas)

Atribut Mutu/Kualitas. Era perdagangan bebas baik secara global maupun dalam skema AEC tahun 2015 akan menuntut persaingan harga dan persaingan kualitas produk/barang. Pada kenyataannya, hasil perkebunan di Indonesia kerap kali kurang mampu bersaing di pasar internasional karena mutu hasil rendah yang disebabkan produk/ komoditas tidak sesuai dengan standar teknis yang dipersyaratkan, adanya kerusakan produk karena penyimpanan dan pengiriman, terkontaminasi dengan kotoran dan benda-



benda asing serta proses panen dan pasca panen kurang sempurna (contoh proses pengeringan, dan lain-lain). Kenyataan ini menunjukkan bahwa budidaya tanaman dan penanganan pascapanen produk perkebunan belum dilakukan dengan optimal.

Standarisasi Mutu/ Kualitas Sektor Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 58 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Bidang Pertanian, bahwa Sistem Standardisasi Nasional di bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Sistem Standardisasi Pertanian (SSP) adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional di bidang pertanian, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, persiapan akreditasi, verifikasi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, serta pendidikan dan pelatihan standardisasi.

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi.

Produk pertanian yang dapat disertifikasi SNI adalah berupa: (1) Barang, adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen; (2) Jasa, adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun yang dimaksud dengan barang pertanian adalah setiap produk yang berbentuk benda pertanian baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diedarkan. Jasa pertanian adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi di bidang pertanian yang disediakan bagi masyarakat untuk dapat melakukan sertifikasi.

Standarisasi Mutu/ Kualitas Subsekrot Perkebunan. Mengingat pentingnya standarisasi nasional berupa SNI di terapkan untuk lahan, perbenihan, produk, alat dan mesin serta metode uji terutama untuk mengurangi atau mengantisipasi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kesesuaian lahan, mengurangi beredarnya benih-benih yang tidak berkualitas dan bukan benih bina, mencegah masuknya produk-produk benih dari luar negeri yang terindikasi terserang OPT dan/atau terdapat bahan kimia yang berbahaya baik bagi manusia maupun biota lainnya, memberikan jaminan mutu dan keamanan produk, memberikan hasil yang bermutu tinggi maka sudah selayaknya seluruh pemanfaatan lahan mengacu pada SNI, seluruh produk benih tanaman memiliki SNI serta seluruh produk olahan menerapkan SNI dan menggunakan alat mesin pengolah sesuai SNI.

Sebagai contoh terkait SNI Biji Kakao. Standar Biji kakao yang bermutu tertuang dalam SNI 2323:2008 tentang Biji kakao. Dalam SNI biji kakao, dipersyaratkan bahwa biji kakao yang bermutu adalah biji kakao yang melewati proses fermentasi. Sementara ini diketahui masih banyak biji kakao yang beredar belum merupakan biji kakao fermentasi dan masih banyak juga pendapat yang meragukan keberhasilan program fermentasi biji kakao. Hal ini disebabkan harga biji kakao fermentasi dan non fermentasi pada tingkat petani belum signifikan perbedaan harganya.

Beberapa komoditas lain seperti kopi memiliki tantangan yang mencakup Produktivitas tanaman rendah dan penanganan pasca panen belum optimal, Diseminasi teknologi, pola kemitraan & kelembagaan petani perlu terus diperkuat, dan terbatasnya akses permodalan & tata niaga perdagangan yang masih panjang (Inefisien). Untuk komoditas tebu juga mengalami beberapa tantangan seperti Gula petani yang tidak sesuai SNI sehingga tidak laku terjual dan menumpuk di gudang, sedangkan untuk tanaman aneka rempah masih kurangnya penanganan pascapanen yang tidak memperhatikan standar.

4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT)

Perubahan iklim, El Nino, La Nina dan emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

Perubahan iklim akibat pemanasan global dihubungkan dengan peningkatan emisi dan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) sehingga terjadi perubahan pola curah hujan, perubahan suhu udara dan diikuti dengan naiknya tinggi permukaan air laut akibat pemuain dan pencairan es di wilayah kutub.



Perubahan iklim dan pengaruh indeks pertanaman (IP). Tinggi dan rendahnya intensitas musim hujan akan berpengaruh terhadap upaya meningkatkan indeks pertanaman (IP) apabila tidak tersedia varietas yang berumur lebih pendek dan tanpa rehabilitasi jaringan irigasi.

Perubahan iklim dan serangan OPT yang eksplosif. Perubahan iklim dapat juga dilihat terhadap munculnya OPT yang populasinya sulit diproyeksi dan tanaman perkebunan rentan terhadap serangan OPT tersebut. Hal ini karena perubahan iklim mengganggu keseimbangan antara populasi serangga hama, musuh alamnya dan tanaman inangnya. Meski demikian, secara umum pengaruh perubahan iklim dapat dilihat dari tanaman yang mengalami tekanan/ stress. Dampak lainnya adalah serangga hama dan mikroba termofilik lebih diuntungkan dengan makin panjangnya musim panas/kemarau dan meningkatnya temperatur.

Perubahan iklim dan bencana alam. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim akan terjadi bencana alam. Indonesia termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam sangat tinggi dan sering disebut sebagai wilayah "rawan bencana". Semua bencana alam tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, rehabilitasi ekonomi, masa panen dan pasca panen, mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian yang meliputi bangunan bendung, dam, jaringan irigasi, jalan usaha tani/jalan produksi, kerusakan tanaman dan ternak, hingga penurunan produktivitas dan produksi pertanian/perkebunan dan akibat bencana lainnya adalah menimbulkan trauma bagi masyarakat korban bencana. Oleh karena itu, kemampuan untukantisipasi bencana alam, penanganan korban bencana, serta kemampuan rehabilitasi ekonomi pasca bencana menjadi penting.

Perubahan iklim dan bergesernya pola atau kalender tanam. Dari sisi budidaya tanaman perkebunan, perubahan iklim akan lebih banyak berpengaruh terhadap terjadinya penurunan produksi, produktivitas dan berubahnya *agro-ecosystem* mikro. Disisi lain, naiknya suhu permukaan bumi dan pergeseran pola curah hujan menyebabkan terjadinya pergeseran pola musim yang berdampak pada perubahan pola dan kalender tanam.

5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan).

Munculnya isu pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

seiring dengan gagasan pembangunan berkelanjutan melalui penetapan strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sekitar tahun 1970-an seiring dengan merebaknya masalah lingkungan. Hal ini ditandai dengan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dengan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun melahirkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Karena itu, pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi penting untuk dikaji. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Setelah target pencapaian tujuan millennium (*Millennium Development Goals/MDGs*) pada tahun 2015, muncullah kesepakatan lanjutan berupa *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep *SDGs* dikemukakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB, New York yang dihadiri perwakilan dari 193 negara dengan mengadopsi konsep "*transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development*". *SDGs* tahun 2015-2030 mengedepankan 3 tujuan yaitu 1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan; 2) mengakhiri segala bentuk kelaparan melalui penciptaan ketahanan pangan, meningkatkan gizi masyarakat dan mendorong pertanian secara berkelanjutan; dan 3) menjamin adanya kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan masyarakat di semua usia. Indikator pencapaian *SDGs* adalah pembangunan kualitas manusia, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta kelestarian lingkungan dengan fondasi meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan sampai dengan tahun 2030.

6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku)

Ketersediaan pangan, energi dan sumber lainnya serta perlindungan pertanian dari gangguan iklim dan lingkungan akan menjadi isu strategis ditengah peningkatan jumlah penduduk dunia yang pada dasarnya tidak hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi juga menjadi komitmen global. Untuk itu, penerapan teknologi tepat guna yang progresif menjadi suatu kewajiban dalam pengembangan pertanian/perkebunan untuk menghasilkan produksi yang optimal dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Produk dan prosedur yang inovatif dalam dunia usaha juga diharapkan memberi peluang untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan khususnya bagaimana menciptakan produk-produk perkebunan yang bermanfaat, aman, sehat dan



bernilai tinggi. Tantangan bagi subsektor perkebunan adalah bagaimana memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya alam perkebunan dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan perkebunan serta menjamin keamanannya dan ketersediaan gizi yang cukup bagi penduduk ditengah peningkatan jumlah penduduk.

7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar)

Aspek distribusi dan pemasaran turut menjadi tantangan pembangunan perkebunan kedepan. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan aksesibilitas, konektivitas dan sarana transportasi yang lebih efisien. Manajemen distribusi produk-produk *agro-industry* perkebunan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian usaha pengembangan produk yang bersangkutan maupun dalam pengembangan ekonomi secara keseluruhan, terutama dikaitkan dengan aspek globalisasi produksi dan globalisasi pasar yang akhirnya akan menimbulkan persaingan global. Dalam globalisasi produksi, setiap negara dapat melakukan kegiatan produksi dimana saja yang paling menguntungkan baginya baik untuk seluruh komponen maupun sebagian komponen produknya; atau menurut bentuk *agro-industry* primer, setengah jadi maupun produk jadi (batasan produk *agro-industry* disini adalah produk-produk hilir pertanian/ perkebunan). Dalam era globalisasi maka akan terjadi proses integrasi pasar domestik dengan pasar dunia sehingga dengan demikian semua kegiatan harus berwawasan, *competitiveness* dan efisiensi, termasuk kegiatan distribusinya.

Aspek pemasaran perlu mendapatkan perhatian agar tingkat keberhasilan agribisnis pertanian/ perkebunan lebih tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Strategi pemasaran yang tepat akan memperpendek sistem atau mata rantai perdagangan sehingga *lost of benefit* atau keuntungan yang hilang akibat panjangnya tataniaga perdagangan bisa dihindari. Kegiatan pemasaran berperan sebagai pembuka jalan bagi produk untuk sampai ke pasar. Bila kegiatan ini sampai terhambat, produk akan tersendat-sendat memasuki pasar. Padahal, produk dari usaha agribisnis pertanian/ perkebunan mempunyai sifat yang mudah sekali rusak atau tidak tahan lama. Strategi pemasaran yang baik harus memahami tentang studi pemasaran, memperkirakan jumlah produksi, mempersiapkan produk, menentukan harga jual, menentukan distribusi dan menentukan kebijakan promosi.

The background of the page is a photograph of cocoa beans and pods. In the upper portion, a white plate is filled with dark brown, roasted cocoa beans. Below the plate, several cocoa pods are visible, some whole and some cut open to reveal the white pulp and seeds inside. The pods have a reddish-brown, textured surface. A semi-transparent white circle is overlaid in the center of the image, containing the title text.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN
DIREKTORAT
JENDERAL
PERKEBUNAN



2.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan lingkup dipersempit dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang harus selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024. Hal ini berarti bahwa konteks Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tidak boleh keluar dari koridor Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B.899/M/PPN/SES/PP.03.02/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019, tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Renstra Kementerian Lembaga 2020-2024, maka Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:



“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Berdasarkan Visi tersebut, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah:



“PERKEBUNAN INDONESIA YANG PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH DAN BERDAYA SAING DALAM MEWUJUDKAN PERTANIAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG UNTUK Mendukung TERCAPAINYA VISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA”

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan diatas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi 3 (tiga) kata kondisi utama, yaitu **produktif, bernilai tambah dan berdaya saing**. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Produktif**, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional.
- **Bernilai tambah** berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.
- **Berdaya saing** berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. Dalam

konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B.899/M/PPN/SES/PP.03.02/12/2019), yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Pada prinsipnya, seluruh Misi Presiden Republik Indonesia tersebut dilaksanakan oleh semua Kementerian/Lembaga/Pemda, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun, untuk menentukan prioritas kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian akan fokus dalam pelaksanaan misi yang kedua, yaitu Stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Oleh karena itu, maka Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut adalah:



“MENINGKATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN ASAL PERKEBUNAN SERTA KEBUTUHAN EKSPOR KOMODITAS PERKEBUNAN DALAM MEMPERKUAT STUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING”

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.



2.2 Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan

Tujuan merupakan penjabaran lebih detil dari visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Visi Direktorat Jenderal tahun 2024. Tujuan Direktorat Jenderal perkebunan tahun 2024 adalah **“Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”**. Tujuan ini diukur melalui 2 (dua) indikator tujuan, yaitu:

- **Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan nasional (%)**

Indikator ini menggambarkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan Indonesia di luar negeri. Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional merepresentasikan pertumbuhan ekonomi perkebunan nasional dari sisi pendapatan, dimana ekspor perkebunan menjadi faktor penentu meningkatnya ekspor pertanian nasional. Pertumbuhan nilai ekspor produk perkebunan ini juga menggambarkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional secara domestik. Hal ini merepresentasikan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan dalam negeri atas komoditas perkebunan nasional.

- **Nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien**

Indikator ini merepresentasikan tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang profesional dan akuntabel, melalui pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Nilai reformasi birokrasi yang semakin meningkat menandakan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan, dimana hal ini juga berarti meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

2.3 Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Selain itu, sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan juga merupakan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran strategis Kementerian Pertanian, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan dapat digambarkan pada Tabel 2.1 berikut ini.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Tabel 2.1 Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perkebunan

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80.50	81.00	81.50	82
		Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	80	45	45	45	45
		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1.8	1.82	1.85	2.00	2.10
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32.58	32.62	32.72	32.75	32.91
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85



Direktorat Jenderal perkebunan memiliki 4 (empat) Sasaran Program (SP) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), meliputi:

● **SP 1. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian**

Sasaran ini merepresentasikan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami peningkatan produktivitas atau proses pengolahan dalam suatu produksi komoditas pertanian. Nilai tambah yang semakin besar atas produk perkebunan dapat berperan bagi pertumbuhan ekonomi. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja, yaitu:

- **IKSP 1. Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan**
- **IKSP 2. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan**
- **IKSP 3. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI**

● **SP 2. Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian**

Sasaran ini merepresentasikan kemampuan suatu negara untuk menumbuhkembangkan komoditas pertanian dalam proses agribisnis yang berhadapan dengan pesaingnya dalam pasar global. Sasaran ini diukur melalui **IKSP. Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan**

● **SP 3. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

Sasaran ini merepresentasikan tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan melalui pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Sasaran ini diukur melalui **IKSP. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan**

● **SP 4. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

Sasaran ini menggambarkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran ini diukur melalui **IKSP. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan**



BAB III
**ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN**



Bab ini membahas arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Arah pembangunan perkebunan nasional disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 serta pembangunan pertanian yang tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Formulasi arah kebijakan dan strategi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Perkebunan, sehingga arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan yang disusun dapat menjawab kebutuhan pembangunan perkebunan nasional kedepan.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah pembangunan nasional 5 tahun kedepan dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Hingga saat ini, RPJMN masih berbentuk naskah teknokratik yang rencananya akan disahkan menjadi RPJMN pada bulan Januari tahun 2020. Sehingga arah kebijakan dan strategi nasional akan diambil dari arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam naskah teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 revisi per 7 Januari tahun 2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Naskah teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 mengusung tema pembangunan "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Tema pembangunan ini sekaligus menjadi Visi Presiden terpilih dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024. Tema pembangunan ini

dilaksanakan melalui 7 agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut adalah:

1. PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. PN7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kementerian Pertanian diharapkan dapat berkontribusi dalam PN 1, "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Untuk mewujudkannya, maka Kementerian Pertanian secara konkrit memberikan kontribusi dalam Program Prioritas (PP) 3, "Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan" dan PP 6, "Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi". Sasaran, indikator serta target yang diharapkan dapat dicapai Kementerian Pertanian pada naskah teknokratik RPJMN ini dapat dijabarkan pada Tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 3.1 Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kementerian Pertanian

No	Arah Kebijakan	Indikator	Target 2020	Target 2024		
PP 3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	7. Produksi padi (gabah kering giling)	1,03%	5,48%		
		8. Produksi jagung	22,92 juta ton	35,30 juta ton		
		9. Produksi daging	25 kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas		
		11. Konsumsi daging	7 Destinasi	7 Destinasi		
		12. Konsumsi sayur dan buah	Rp. 1.214 triliun	Rp.1.846 triliun		
		13. Produksi beras biofortifikasi	4 kab/kota	20 kab/kota (kumulatif)		
		14. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*)	8 lokasi	11 lokasi		
		15. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*)	30 unit	42 unit		
		16. Tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani	3,2%	4,7%		
		17. Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*)	49,2%	59,8%		
		18. Nilai tukar petani	19 juta orang	21 juta orang		
		PP 6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	1. Pertumbuhan PDB pertanian	3,36%	3,76%

Kementerian Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan sasaran dan indikator RPJMN di atas, dimana kontribusi tersebut dapat diwujudkan pada level menteri, eselon I, maupun eselon II. Tentunya penggunaan sasaran berupa *impact* (level Menteri), *outcome* (level I), *output* (level II) maupun penggunaan indikator yang memenuhi syarat SMART, yang meliputi: *specific* (jelas, tidak multitafsir), *measurable* (dapat diukur), *achievable/attainable* (dapat diraih), *relevant* (relevan dengan kinerja yang ingin diukur), serta *time bound* (memiliki batasan waktu pengukuran), akan sangat menentukan pemilihan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam mewujudkan standar kinerja organisasi yang berkualitas.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang menjadi koridor perumusan strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut.

- **Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional**

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya menjaga ketahanan pangan nasional dilaksanakan melalui strategi:

- a) Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis
- b) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
- c) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
- d) Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbenihan
- e) Perlindungan Tanaman dari OPT dan DPI
- f) Memperpendek rantai pasok
- g) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan
- h) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian
- i) Inovasi pertanian bioindustry

- **Arah kebijakan 2: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian**

Nilai tambah pertanian menggambarkan kemampuan industri pertanian untuk menciptakan pendapatan baik bagi pelaku usaha pertanian, pendapatan wilayah maupun pendapatan nasional. Peningkatan nilai tambah pertanian diharapkan juga dapat mendongkrak daya saing pertanian Indonesia. Peningkatan daya saing pertanian menunjukkan peningkatan inovasi pertanian guna menciptakan keunggulan komoditas pertanian Indonesia terhadap komoditas pertanian negara lain. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan melalui strategi:



- a) Peningkatan pemasaran dan investasi
- b) Penerapan standarisasi dan mutu hasil
- c) Penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan
- d) Peningkatan Nilai Tambah produk pertanian
- e) Penguatan sistem perkarantina
- f) Digitalisasi & percepatan perijinan
- g) Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan

● **Arah kebijakan 3: Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian**

Keberlanjutan merupakan isu internasional yang secara serentak di implementasikan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Keberlanjutan sumber daya pertanian yaitu menjamin ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan pertanian hingga masa mendatang dan memastikan generasi selanjutnya masih dapat menyelenggarakan pertanian. Kebutuhan penyelenggaraan pertanian didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagai kebutuhan dasar infrastruktur pertanian, meliputi air, lahan, pupuk dan pestisida, pembiayaan, serta alat dan mesin pertanian. Kebutuhan dasar tersebut menjadi enabler dalam mencapai target produksi komoditas strategis nasional. Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta menjaga ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan melalui strategi:

- a) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
- b) Pengelolaan air untuk pertanian secara berkesinambungan
- c) Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- d) Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
- e) Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian
- f) Penerapan teknologi untuk pengembangan sumber daya lahan

● **Arah kebijakan 4: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian**

Sumber daya manusia pertanian adalah salah satu modal utama penyelenggaraan pertanian. Peningkatan kualitas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Peningkatan kompetensi SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi:

- a) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian
- b) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
- c) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- d) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
- e) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
- f) Penguatan kelembagaan petani

● **Arah kebijakan 5: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**

Implementasi Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 bertema “Pemerintahan Berkelas Dunia” dimana diharapkan penyelenggaraan birokrasi di Indonesia akan lebih akuntabel, profesional dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dilaksanakan melalui strategi:

- Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perkebunan

Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024, digambarkan melalui kerangka strategis pada Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 Kerangka strategis pembangunan perkebunan nasional



Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang saling bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP).

Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Sedangkan pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan dan hasil *focus group discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024.



- **Kegiatan 1: Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman**

Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, yang pada akhirnya meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.

- **Kegiatan 2: Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan**

Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman semusim dan rempah. Terdapat beberapa komoditas tanaman semusim dan rempah yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman tebu, tembakau, dan kapas untuk pengendali impor, serta tanaman lada, pala, nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh, gambir, dan vanili untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

- **Kegiatan 3: Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan**

Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman tahunan dan penyegar. Terdapat beberapa komoditas tanaman tahunan dan penyegar yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman kemiri sunan dan sagu untuk pengendali impor, serta tanaman kopi, kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kelapa, teh, dan aren untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.



- **Kegiatan 4: Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI**

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah kejadian serangan OPT dan DPI yang tidak melebihi 2% dari total luas areal tanaman Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

- **Kegiatan 5: Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan**

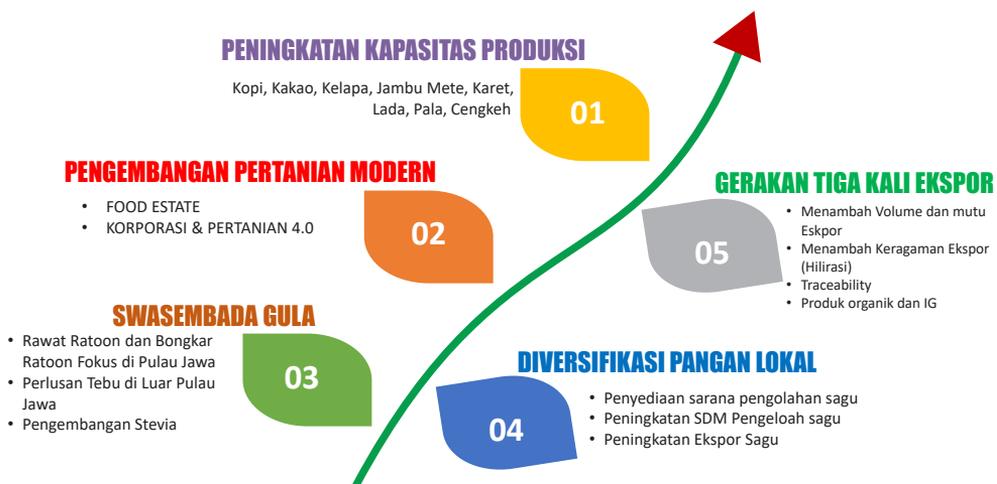
Kegiatan peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional sesuai amanat RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

- **Kegiatan 6: Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian**

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan secara selaras dengan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan **"Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian"** merupakan kontribusi Ditjen Perkebunan dalam mendukung upaya Kementerian Pertanian Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, yang dilaksanakan melalui strategi: a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Seluruh kegiatan Ditjen perkebunan pada prinsipnya mendukung tujuan Kementerian Pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi, yang dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) Peningkatan kapasitas produksi, (2) Diversifikasi pangan lokal, (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) Pengembangan pertanian modern, dan (5) Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks)

STRATEGI MEMBANGUN PERTANIAN MAJU, MANDIRI, MODERN MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN DAN MENINGKATKAN NILAI TAMBAH SERTA DAYA SAING PRODUK PERTANIAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN



KEGIATAN UTAMA DAN PENDUKUNG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2022



Gambar 3. 2 Pendekatan Strategi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian 2020 -2024



Secara rinci kegiatan utama dan Terobosan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan Daya Saing Produk Pertanian diantaranya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Prioritas Pertanian**
- 2. Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani**

Korporasi petani merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan pertanian di Indonesia. Dengan korporasi petani, pengelolaan sumber daya bisa lebih optimal karena dilakukan secara lebih terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan

tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Penumbuhkembangan korporasi petani merupakan bagian dari upaya pemberdayaan, yang diyakini mampu mewujudkan transformasi kelembagaan petani menjadi badan usaha yang menerapkan modernisasi dalam mengelola keseluruhan rantai nilai usaha pertanian berbasis kawasan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penumbuhan dan pengembangan korporasi petani sebagai salah satu terobosan dalam mewujudkan kesejahteraan petani yang merupakan tujuan utama pembangunan pertanian.

Kegiatan yang didorong untuk penumbuhan dan perkembangan korporasi antara lain :

a. *Pengembangan 1.000 Desa Perkebunan*

Terobosan untuk menghasilkan komoditas perkebunan berkualitas tinggi yang berdaya bersaing dilakukan melalui pengembangan 1.000 Desa Perkebunan yang nantinya akan bersinergi dan membangun kawasan perkebunan berbasis korporasi petani/perkebunan. Inisiasi kegiatan 1.000 Desa perkebunan dengan menumbuhkembangkan Desa Mandiri Perkebunan yaitu desa yang mampu menghasilkan benih tanaman perkebunan lokal berkualitas, yang melibatkan masyarakat di desa yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan membangun nursery dan kebun sumber benih (KSB) modern di kawasan Cluster Pengembangan Perkebunan, Pembangunan Desa Mandiri Benih, dan Pembinaan Penangkar. Selain Desa Mandiri Benih juga akan dikembangkan desa produsen dan pengolahan komoditas perkebunan terintegrasi untuk ekspor yang menerapkan teknologi terstandar dan membangun kemitraan dengan pelaku ekspor sebagai bagian dari korporasi petani.

Pengembangan 1.000 Desa Perkebunan Sub sektor perkebunan telah berkontribusi besar terhadap devisa negara dan cukup dominan atas pendapatan negara non-migas. Untuk terus mendorong kualitas komoditas agar mampu memenuhi permintaan pasar, Kementan telah mendorong penuh

pengembangan perkebunan hulu dan hilir untuk menghasilkan komoditas berkualitas tinggi dan dapat bersaing di pasar global. Untuk mewujudkan pertumbuhan sub sektor perkebunan secara merata, diperlukan adanya kegiatan terobosan yang menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas komoditas perkebunan yang mampu menyediakan komoditas perkebunan sebagai bahan baku yang diiringi dengan penguatan industri perkebunan. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu: (1) Modernisasi perkebunan; (2) Optimalisasi peningkatan produksi perkebunan; (3) Penguatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan dan (4) Penguatan profesionalisme SDM pekebun, penyuluh dan petugas teknis lainnya.

b) *Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)*

Food Estate Berbasis Korporasi Petani Penumbuhkembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate merupakan salah satu kebijakan dan program terobosan yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN)/Major Project 2020-2024 untuk penguatan lumbung pangan, dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis global, antara lain: masa pandemi COVID-19 dan peringatan musim kemarau, ancaman krisis pangan, ketersediaan pangan bagi 273 juta penduduk, dan pembatasan dalam produksi ekspor pangan global. Kawasan food estate perlu dikembangkan karena memiliki keunggulan komparatif seperti luasnya potensi sumberdaya lahan yang sesuai, tersedianya sumberdaya air dan iklim, serta adanya dukungan kondisi infrastruktur, kondisi eksisting bisnis, dan sosial budaya masyarakat Food Estate berbasis Korporasi petani adalah usaha pertanian skala besar berbasis klaster yang dilakukan secara terintegrasi dan berdaya saing mencakup komoditas pangan, hortikultura, ternak, perkebunan dilakukan melalui mekanisasi, modernisasi pertanian dan sistem digitalisasi sehingga mampu melakukan hilirisasi produksi pertanian sebagai industri dengan mengkorporasikan petani. Inisiasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate dilaksanakan di (1) Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Provinsi Sumatera Utara; (3) Provinsi Nusa Tenggara Timur; (4) Provinsi Sumatera Selatan dan (5) Provinsi Papua. Diharapkan selain ke lima provinsi tersebut, provinsi lain juga dapat mengembangkan KSPP/Food Estate dengan meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dengan peran kelembagaan petani yang tumbuhkan dan berkembang menjadi korporasi petani sebagai pelaku utamanya.

3. Diversifikasi Pangan Lokal

Pengembangan Sagu

Sagu merupakan tanaman asli Indonesia yang dapat menjadi alternatif pangan nasional. Sejak zaman dahulu, sagu telah menjadi pangan utama masyarakat kawasan Timur Indonesia. Indonesia memiliki potensi sagu terbesar di dunia,



mencapai 5,5 juta hektare dari total 6,5 juta hektare luas lahan sagu dunia, dari total luas tersebut, 5,2 juta hektare berada di Papua. Sagu berperan penting dan strategis bagi ketahanan pangan nasional terutama menghadapi krisis pangan di masa pandemi dengan memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai komoditas pangan lokal. Selain berpotensi sebagai sumber pangan karbohidrat pengganti beras, Sagu juga memiliki potensi sebagai bahan baku industri yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Telah banyak bentuk produk turunan dari sagu seperti glukosa, yang dihasilkan melalui pemanfaatan pati dan dapat dijadikan etanol dan fruktosa dalam industri makanan dan minuman. Selain itu, Sagu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi dextrin yang umum digunakan di industri kayu, kosmetik, farmasi, dan pestisida. Melihat potensi sagu yang begitu besar Kementan telah memasukkan pengembangan sagu sebagai target pembangunan pertanian selain mengembalikan sagu sebagai pangan utama masyarakat juga berupa peningkatan volume ekspor, tumbuhnya industri turunan/hilirisasi melalui pengembangan industri/pabrik pengolahan di sentra produksi melalui investasi.

4. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat Penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Melalui PEN, telah diluncurkan stimulus ekonomi yang ditujukan untuk membantu dunia usaha, baik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun korporasi. Termasuk stimulus yang bertujuan menjaga kinerja di sektor pertanian yakni Program Padat Karya Pertanian, Banpres Produktif UMKM Sektor Pertanian; Subsidi Bunga Mikro/Kredit Usaha Rakyat; dan Dukungan Pembiayaan Koperasi dengan Skema Dana Bergulir. Program PEN di sektor pertanian yang dijalankan pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani diantaranya ditujukan untuk: (1) pembangunan food estate berbasis korporasi dalam kerangka penguatan sistem pangan nasional; (2) pengembangan klaster bisnis padi menggunakan pendekatan pengelolaan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area; (3) pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan Creating Shared Value (CSV) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan petani; (4) kemitraan inklusif Closed Loop pada komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas (ABGC); (5) pengembangan 1.000 desa sapi program untuk peningkatan populasi dan produktivitas sapi dan; (6) pengembangan korporasi petani dengan arah menuju sistem agribisnis hulu-hilir yang mengedepankan pemberdayaan petani.

3.4 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Permen PPN 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan kata lain, kerangka regulasi merupakan dukungan dalam bentuk regulasi guna mencapai tujuan organisasi. Kerangka regulasi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung pembangunan perkebunan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024

Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Saat ini, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Batas luas penggunaan lahan pada usaha perkebunan	Sektor perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional sekaligus memperoleh devisa Negara.	Ditjen Perkebunan	Setneg, Bappenas, Kemenko, Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Batas luas penggunaan lahan pada usaha perkebunan

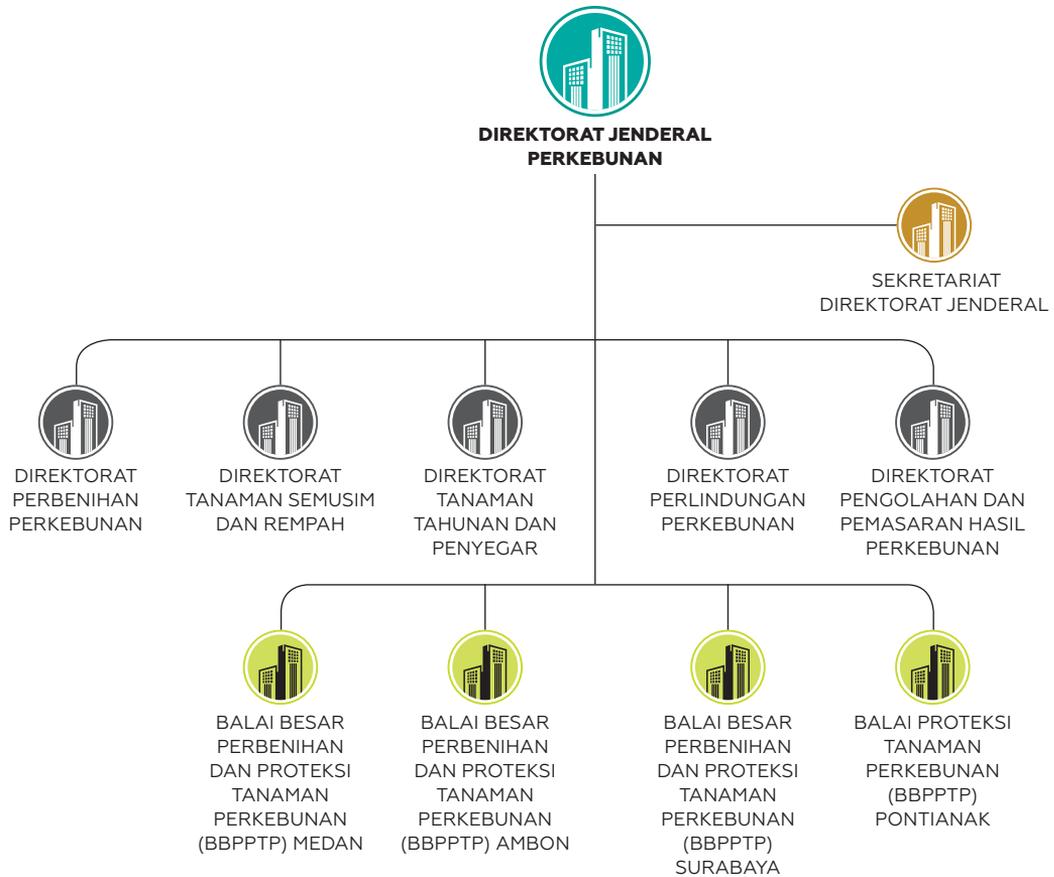
3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat K/L berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Setiap organisasi membutuhkan fungsi dan struktur organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategis, sesuai prinsip *structure follow strategy*. Selain itu, tata laksana yang baik diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM termasuk didalamnya. Oleh karena itu, kerangka kelembagaan merepresentasikan desain organisasi yang dibutuhkan untuk mengakomodir arah strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024. Berdasarkan hasil diskusi



dengan Pimpinan dan pemangku kepentingan, desain organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan masih *fit* dengan arah strategis organisasi 5 (lima) tahun kedepan. Berikut adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan.



Gambar 3.3 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perkebunan

Berdasarkan GAMBAR 3.3, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perkebunan didukung oleh 9 (sembilan) unit kerja setingkat Eselon II serta 1 (satu) unit kerja setingkat Eselon III. Sebanyak 5 (lima) unit kerja menjalankan fungsi teknis, meliputi: Direktorat Perbenihan Perkebunan; Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah; Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar; Direktorat Perlindungan Perkebunan; serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Sementara fungsi manajerial diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Selain itu, Direktorat Jenderal Perkebunan juga dilengkapi dengan 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu: Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan; BBPPTP Ambon; BBPPTP Surabaya, serta Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak.

The background of the page is a high-quality photograph of two silver spoons resting on a dark, textured wooden surface. The spoon on the left is filled with dark, irregularly shaped black peppercorns. The spoon on the right is filled with smooth, round white peppercorns. Some peppercorns are scattered on the wooden surface around the spoons. A semi-transparent circular graphic is overlaid in the center, containing the chapter title.

BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA
PENDANAAN



4.1 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan

Target kinerja merupakan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan. Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak ukur capaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan. Target kinerja Direktorat Jenderal

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran program yang menjadi barometer capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024. Lebih detail mengenai target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 - 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80.50	81.00	81.50	82
		Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	80	45	45	45	45
		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1.8	1.82	1.85	2.00	2.10
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32.58	32.62	32.72	32.75	32.91
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85

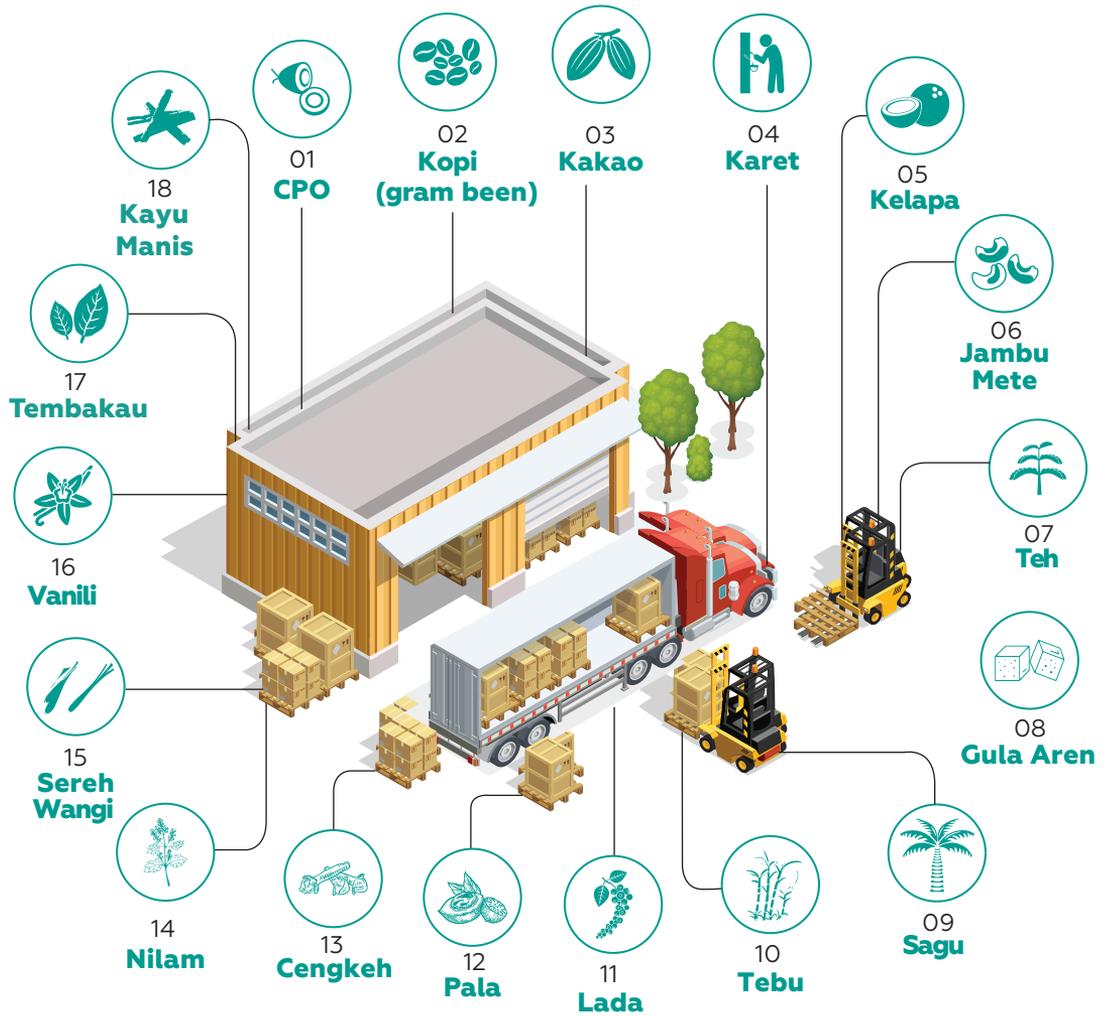
Tabel 4.1 di atas menunjukkan target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan untuk periode 2020-2024. Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki 4 (empat) sasaran program yang capaiannya diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja sasaran program. Setiap indikator kinerja sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan cerminan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada tiap tahun pengukuran. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan:

1. Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan

Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan diukur dalam satuan persentase, dengan data yang dikeluarkan BPS dan diolah oleh Pusdatin Pertanian. Perhitungan tersebut. Dihitung dari nilai ekspor tahun berjalan kemudian dibandingkan dengan nilai ekspor tahun lalu untuk menghitung pertumbuhan nilai ekspor produk perkebunan. Produk ekspor prioritas yang diukur adalah Sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, jambu mete, teh, gula aren, sagu, tebu, lada, pala, cengkeh, nilam, sereh wangi, vanili, tembakau, kayu manis



Komoditas Ekspor



Gambar 4. 1 Daftar Komoditas Ekspor

Data bukti realisasi capaian indikator kinerja sasaran program, ekspor didapat dari data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Tingkat kemanfaatan sarana sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan

Indikator ini mengukur tingkat pemenuhan pemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan, baik untuk peningkatan ekspor maupun untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Pemenuhan sarana dapat dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Lembaga, Pemda, dan/atau organisasi lain. Adapun pemenuhan kebutuhan sarana perkebunan dilakukan harus mengikuti standar peruntukan yang telah ditentukan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, sehingga bisa dimanfaatkan.

3. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan

Indikator ini mengukur persentase serangan OPT yang berhasil ditangani terhadap total luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terjadi pada tanaman perkebunan. Upaya penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif).

4. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI

Indikator ini mengukur persentase DPI yang berhasil ditangani terhadap total luas yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang terjadi pada tanaman perkebunan. Upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatanantisipasi dampak perubahan iklim adalah penanganan dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko kekeringan dalam mendukung peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan.

5. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Indikator ini mengukur capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan program reformasi birokrasi yang akan diukur secara rutin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Terdapat 2 (dua) unsur yang dinilai, yaitu unsur reform dan unsur pemenuhan.



6. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

4.2 Kerangka Pendanaan

Subbab ini menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan dalam menyelenggarakan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Adapun sumber pendanaan yang akan digunakan pada periode 2020-2024 diantaranya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjas. ama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*





BAB V
PENUTUP



Narasi RPJMN Tahun 2020-2024 telah disusun sebagai landasan untuk lembaga eksekutif negara (K/L/P) untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian turut berkontribusi dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional. Kementerian Pertanian tidak terlepas dari unsur pendukungnya untuk mencapai hal tersebut. Direktorat Jenderal Perkebunan hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian dari subsektor perkebunan. Dokumen Rencana Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024 merupakan rencana yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai koridor dalam membangun subsektor perkebunan untuk periode 2020-2024. Dokumen ini berpedoman pada Rencana Strategi Kementerian Pertanian serta arah dan kebijakan pimpinan di Direktorat Jenderal Perkebunan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan strategi yang dilaksanakan selaras sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "Indonesia berpendapatan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan". Dari visi tersebut, diturunkan beberapa Program Nasional yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional periode 2020-2024. Kementerian Pertanian berkontribusi pada Program Nasional (PN) 1, yaitu "Penguatan Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas", dengan 2 (dua) Program Prioritas, yaitu: PP 3 ("Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan") & PP 6 ("Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi"). Kementerian Pertanian juga telah menentukan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi, yaitu: 1) Terjaganya ketahanan pangan nasional; 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; 3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian; 4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian; serta 5) Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

Berlandaskan pada hal tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan 6 (enam) kegiatan ditingkat Direktorat Jenderal, yaitu: 1) **Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;** 2) **Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;** 3) **Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;** 4) **Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;** 5) **Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan;** serta 6) **Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.** Keenam Berjalannya rencana strategis ini, sangat erat kaitannya dengan regulasi dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kedua hal tersebut menjadi faktor pendukung

dalam berjalannya proses implementasi rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan. Implementasi yang cepat tanggap dan tepat sasaran merupakan syarat mutlak dalam mencapai tujuan organisasi pada akhir periode rencana strategis (tahun 2024). Dengan demikian, sasaran-sasaran yang ditetapkan harus dicapai dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan aktivitas untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kerangka pendanaan yang komprehensif dan mumpuni juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan dan aktivitas secara finansial agar pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan.

Terwujudnya cita-cita Direktorat Jenderal Perkebunan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menggerakkan subsektor perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai regulator, menyusun kebijakan sebagai koridor untuk menciptakan iklim positif industri perkebunan. Industri perkebunan berkontribusi dalam mengembangkan dan memproduksi komoditas perkebunan. Masyarakat umum sebagai konsumen komoditas perkebunan dalam memberikan umpan balik agar industri perkebunan terus berkembang. Ketiga pihak tersebut harus bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem industri perkebunan sehingga cita-cita yang telah ditentukan dapat terwujud.



LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS

**Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
2020 - 2024**



LAMPIRAN 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024

PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET				
				2021	2022	2023	2024	
SK 1	Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman tahunan dan penyegar							
1	Produksi kelapa sawit (CPO)	Ton	49.117.260,00	49.924.420,00	52.869.960,78	56.042.158,43	59.404.687,93	
	Peningkatan produksi kelapa sawit (CPO+PKO)	%	5,80	5,90	5,90	6,00	6,00	
	Produktivitas Kelapa Sawit	ton/ha	3,70	3,80	3,85	4,00	4,00	
	Luas kawasan Kelapa Sawit	Ha	14.714.253,90	15.082.110,25	15.459.163,00	15.845.642,08	16.241.783,13	
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Kelapa Sawit terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	69	63	64	65	67	
	Luas tanaman kelapa sawit yang menghasilkan	Ha	11.813.253,40	13.138.005,26	13.732.457,35	14.010.539,61	14.851.171,98	
2	Produksi kakao***	Ton	739.483	761.856	771.934	782.011	792.089	
	Produktivitas kakao	ton/ha	0,8	0,709	0,713	0,719	0,721	
	Luas kawasan kakao	Ha	1.689.229,50	1.671.055	1.672.225	1.673.398	1.674.574	
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman kakao terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	30	45	50	55	60	
	Luas tanaman kakao yang menghasilkan	Ha	788.827,7	1.074.702	1.083.416	1.087.033	1.097.837	
3	Produksi kopi***	Ton	773.409	785.946	798.451	810.957	823.462	
	Produktivitas kopi (green bean)	ton/ha	0,807	0,813	0,815	0,818	0,82	
	Luas kawasan kopi (green bean)	Ha	1.258.203,1	1.267.639	1.271.235	1.274.831	1.278.426	
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman kopi (green bean) terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	30	45	50	55	60	
	Luas tanaman kopi (green bean) yang menghasilkan	Ha	979.231,8	966.723	979.694	991.390	1.004.222	



Lanjutan...

PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
4	Produksi jambu mete	Ton	139.873	142.619	145.471	148.381	151.348
	Produktivitas jambu mete	ton/ha	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50
	Luas kawasan jambu mete	Ha	510.173	510.233	512.274	514.323	516.380
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman jambu mete terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	60	60	65	65	65
	Luas tanaman jambu mete yang menghasilkan	Ha	318.582,5	285.238	290.942	296.762	302.696
5	Produksi karet	Ton	3.545.693	3.317.420	3.375.961	3.436.943	3.501.308
	Produktivitas karet	ton/ha	1,1	1,079	1,095	1,112	1,130
	Luas kawasan karet	Ha	3.692.218	3.701.468	3.710.722	3.719.998	3.729.298
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman karet terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	60	65	65	70	70
	Luas tanaman karet yang menghasilkan	Ha	3.067.711,2	3.075.380	3.083.069	3.090.776	3.098.503
6	Produksi kelapa	Ton	2.798.979	2.829.768	2.794.742	2.997.012	3.292.012
	Produktivitas kelapa	ton/ha	1,129	1,062	1,038	1,103	1,163
	Luas kawasan kelapa	Ha	3.514.726	3.364.997	3.374.997	3.384.997	3.394.997
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman kelapa terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	30	40	50	60	65
	Luas tanaman kelapa yang menghasilkan	Ha	2.638.237,2	2.664.620	2.691.266	2.718.178	2.829.912
7	Produksi teh	Ton	138.323	139.768	140.645	141.522	142.399
	Produktivitas teh	ton/ha	1,6	1,646	1,657	1,660	1,663
	Luas kawasan teh	Ha	113.501,9	108.163	108.777	109.393	110.011
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman teh terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	45	35	40	45	50



Lanjutan...

PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Luas tanaman teh yang menghasilkan	Ha	89.186,6	84.923	84.885	85.264	85.607
8	Produksi gula aren	Ton	70.433	70.786	70.886	70.986	71.086
	Produktivitas nira	ton/ha	1.918,5	1.909	1.907	1.904	1.902
	Luas kawasan aren	Ha	64.830	64.930	65.030	65.130	65.230
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman aren terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	25	35	40	45	50
	Luas tanaman aren yang menghasilkan	Ha	36.890	37.074	37.174	37.274	37.374
9	Produksi sagu	Ton	472.865	483.359	483.859	484.359	484.859
	Produktivitas sagu	ton/ha	3.735,6	3.725	3.715	3.705	3.694
	Luas kawasan sagu	Ha	315.740	316.240	316.740	317.240	317.740
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman sagu terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	25	35	40	45	50
	Luas tanaman sagu yang menghasilkan	Ha	129.245	129.745	130.245	130.745	131.245

*** Produksi kakao dan produksi kopi sesuai amanat RPJMN juga dihitung peningkatan produksinya



PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET					
				2021	2022	2023	2024		
SK1	Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman semusim dan rempah								
1	Produksi tebu	Ton	33.107.481	32.961.328	34.994.904	37.156.917	39.455.822		
	Produktivitas tebu	ton/ha	71,50	74,65	75,67	76,69	77,71		
	Luas kawasan tebu	Ha	435.668	441.521	462.460	484.518	507.760		
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman tebu terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	13,2	18,50	20,16	23,40	27,44		
	Luas tanaman tebu yang menghasilkan	Ha	435.668	441.521	462.460	484.518	507.760		
2	Produksi lada	Ton	89.902	90.847	91.793	92.738	93.683		
	Produktivitas lada	ton/ha	48	0,80	0,80	0,81	0,81		
	Luas kawasan lada	Ha	196.922	193.474	195.409	197.363	199.336		
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman lada terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	20	26,66	26,83	27,00	27,16		
	Luas tanaman lada yang menghasilkan	Ha	196.922	113.593	114.048	114.504	114.962		
3	Produksi pala	Ton	37.463	40.486	41.158	41.569	41.985		
	Produktivitas Pala	ton/ha	19	0,43	0,44	0,44	0,44		
	Luas kawasan Pala	Ha	218.998	231.978	234.297	236.640	239.007		
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Pala terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	20	14,08	14,22	14,36	14,50		
	Luas tanaman Pala yang menghasilkan	Ha	218.998	93.343	93.540	94.475	95.420		
4	Produksi cengkeh	Ton	137.757	140.787	143.989	147.191	150.394		
	Produktivitas Cengkeh	ton/ha	22	0,42	0,43	0,44	0,45		

PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Luas kawasan Cengkeh	Ha	572.516	576.632	582.399	588.223	594.105
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Cengkeh terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	20	9,58	9,77	9,97	10,17
	Luas tanaman Cengkeh yang menghasilkan	Ha	572.516	332.894	334.226	335.563	336.905
5	Produksi nilam	Ton	2.442	2.377	2.571	2.770	2.972
	Produktivitas Nilam	ton/ha	23,5	0,14	0,15	0,16	0,17
	Luas kawasan Nilam	Ha	20.746	16.971	17.141	17.312	17.485
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman Nilam terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	20	9,30	10,00	10,70	11,30
	Luas tanaman Nilam yang menghasilkan	Ha	20.746	16.971	17.141	17.312	17.485
6	Produksi sereh wangi	Ton	275.917	4.425	4.827	5.367	5.948
	Produktivitas sereh wangi	ton/ha	13,5	0,16	0,17	0,18	0,19
	Luas kawasan sereh wangi	Ha	20.307	27.044	28.396	29.816	31.307
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman sereh wangi terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	20	14	14	15	16
	Luas tanaman sereh wangi yang menghasilkan	Ha	20.307	27.044	28.396	29.816	31.307
7	Produksi vanili	Ton	1.481	1.634	1.753	1.881	2.017
	Produktivitas vanili	ton/ha	1,2	0,38	0,40	0,41	0,43
	Luas kawasan vanili	Ha	10.624	11.029	11.435	11.840	12.245
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman vanili terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	20	26	27	28	29



Lanjutan...

PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Luas tanaman vanili yang menghasilkan	Ha	10.624	4.246,17	4.402,48	4.558,40	4.714,33
8	Produksi tembakau	Ton	239.743	303.514	375.346	456.849	547.363
	Produktivitas tembakau	ton/ha	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80
	Luas kawasan tembakau	Ha	239.742,6	252.928	268.104	285.531	304.090
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman tembakau terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	20	24	28	32	36
	Luas tanaman tembakau yang menghasilkan	Ha	239.742,6	252.928	268.104	285.531	304.090
9	Produksi Kayu Manis	Ton	79.960	81.519	83.160	84.800	86.440
	Produktivitas kayu manis	ton/ha	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Luas kawasan kayu manis	Ha	92.050	93.560	97.557	101.554	105.551
	Tingkat pemenuhan budidaya tanaman tembakau terhadap Good Agricultural Practice (GAP)	%	50	50	50	50	50
	Luas tanaman kayu manis yang menghasilkan	Ha	53.989	54.480	55.396	56.319	57.249



PENGUATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK 1	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan						
	1 Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	45	45	45	45	45
	Jumlah serangan OPT pada tanaman semusim dan rempah yang ditangani	Ha	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Luas lahan terdampak OPT yang difasilitasi teknologi pengendalian hama terpadu tanaman semusim dan rempah	Ha	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Luas lahan terdampak OPT yang difasilitasi sarana pengendalian OPT tanaman semusim dan rempah	Ha	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Jumlah serangan OPT pada tanaman tahunan dan penyegar yang ditangani	Ha	530.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Luas lahan terdampak OPT yang difasilitasi teknologi pengendalian hama terpadu tanaman tahunan dan penyegar	Ha	530.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Luas lahan terdampak OPT yang difasilitasi sarana pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar	Ha	530.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	2 Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
	Jumlah risiko DPI tanaman perkebunan yang berhasil dimitigasi	Ha	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080



Lanjutan...

PENGUATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah resiko kebakaran yang dimitigasi	Ha	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	Jumlah resiko gangguan usaha yang dimitigasi	Kasus	21	21	21	21	21
	Jumlah resiko DPI yang dimitigasi	Ha	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
3	Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT	Layanan	8	9	9	9	9
	Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT	Layanan	8	9	9	9	9
	Jumlah layanan publik data dan informasi OPT	Layanan	3	3	3	3	3
	Jumlah layanan publik kelembagaan pengendalian OPT	Layanan	5	6	6	6	6
4	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBP2TP Medan	Layanan	5	5	5	5	5
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan	Layanan	5	5	5	5	5
	Jumlah akreditasi lab proteksi sesuai standar internasional	Akreditasi	2	2	2	2	2
	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	5	5	4	4	3
5	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBP2TP Surabaya	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah akreditasi lab proteksi sesuai standar internasional	Akreditasi	1	1	1	1	1



Lanjutan...

PENGUATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	27	27	26	25	24
6	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBP2TP Ambon	Layanan	8	8	8	9	9
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan	Layanan	8	8	8	9	9
	Jumlah akreditasi lab proteksi sesuai standar internasional	Akreditasi	1	1	2	2	2
	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	5	4	3	2	2
7	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BPTP Pontianak	Layanan	3	3	3	3	3
	Waktu maksimal layanan rekomendasi teknis yang diberikan (rata-rata)	Hari	7	7	7	7	7
	Waktu maksimal layanan publik data dan informasi proteksi tanaman perkebunan yang diberikan (rata-rata)	Hari	7	7	7	7	7
	Jumlah akreditasi lab proteksi sesuai standar internasional	Akreditasi	1	1	1	2	2



PENGUATAN PERBENIHAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK 1	Tersedianya benih tanaman perkebunan						
1	Jumlah benih kelapa sawit yang dihasilkan	Butir	5.357.309	5.370.703	27.079.811	27.098.662	27.117.560
	Jumlah varietas benih kelapa sawit yang tersedia	varietas	2	2	2	2	2
	Jumlah varietas benih kelapa sawit yang dinilai/dievaluasi	varietas	2	2	2	2	2
	Jumlah benih kelapa sawit yang bermutu	butir	5.357.309	5.370.703	27.079.811	27.098.662	27.117.560
	Jumlah benih kelapa sawit yang tersertifikasi	butir	5.357.309	5.370.703	27.079.811	27.098.662	27.117.560
	Jumlah benih kelapa sawit yang tersedia	butir	5.357.309	5.370.703	27.079.811	27.098.662	27.117.560
	Jumlah benih kelapa sawit yang tersedia	butir	5.357.309	5.370.703	27.079.811	27.098.662	27.117.560
2	Jumlah benih kakao yang dihasilkan	Batang	5.897.691	5.916.470	6.244.560	6.247.560	6.250.560
	Jumlah varietas benih kakao yang tersedia	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah varietas benih kakao yang dinilai/dievaluasi	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah benih kakao yang bermutu	batang	5.897.691	5.916.470	6.244.560	6.247.560	6.250.560
	Jumlah benih kakao yang tersertifikasi	batang	5.897.691	5.916.470	6.244.560	6.247.560	6.250.560
	Jumlah benih kakao yang tersedia	batang	5.897.691	5.916.470	6.244.560	6.247.560	6.250.560
	Jumlah benih kakao yang tersedia	batang	5.897.691	5.916.470	6.244.560	6.247.560	6.250.560
3	Jumlah benih kopi yang dihasilkan	Batang	10.333.444	7.926.112	27.461.600	27.461.600	22.461.600



PENGUATAN PERBENIHAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah varietas benih kopi (green bean) yang tersedia	varietas	2	2	2	2	2
	Jumlah varietas benih kopi (green bean) yang dinilai/dievaluasi	varietas	2	2	2	2	2
	Jumlah benih kopi (green bean) yang bermutu	batang	10.333.444	7.926.112	27.461.600	27.461.600	22.461.600
	Jumlah benih kopi (green bean) yang tersertifikasi	batang	10.333.444	7.926.112	27.461.600	27.461.600	22.461.600
	Jumlah benih kopi (green bean) yang tersedia	batang	10.333.444	7.926.112	27.461.600	27.461.600	22.461.600
	Jumlah benih kopi (green bean) yang tersedia	batang	10.333.444	7.926.112	27.461.600	27.461.600	22.461.600
4	Jumlah benih kelapa yang dihasilkan	Batang	3.000.000	3.000.000	3.557.442	3.557.442	3.557.442
	Jumlah varietas benih kelapa yang tersedia	varietas	2	2	2	2	2
	Jumlah varietas benih kelapa yang dinilai/dievaluasi	varietas	2	2	2	2	2
	Jumlah benih kelapa yang bermutu	batang	3.000.000	3.000.000	3.557.442	3.557.442	3.557.442
	Jumlah benih kelapa yang tersertifikasi	batang	3.000.000	3.000.000	3.557.442	3.557.442	3.557.442
	Jumlah benih kelapa yang tersedia	batang	3.000.000	3.000.000	3.557.442	3.557.442	3.557.442
	Jumlah benih kelapa yang tersedia	batang	3.000.000	3.000.000	3.557.442	3.557.442	3.557.442
5	Jumlah benih karet yang dihasilkan	Batang	7.500.000	8.500.000	7.278.570	7.427.570	7.778.570
	Jumlah varietas benih karet yang tersedia	varietas	2	2	2	2	2



Lanjutan...

PENGUATAN PERBENIHAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah varietas benih karet yang dinilai/dievaluasi	varietas	2	2	2	2	2
	Jumlah benih karet yang bermutu	batang	7.500.000	8.500.000	7.278.570	7.427.570	7.778.570
	Jumlah benih karet yang tersertifikasi	batang	7.500.000	8.500.000	7.278.570	7.427.570	7.778.570
	Jumlah benih karet yang tersedia	batang	7.500.000	8.500.000	7.278.570	7.427.570	7.778.570
	Jumlah benih karet yang tersedia	batang	7.500.000	8.500.000	7.278.570	7.427.570	7.778.570
6	Jumlah benih jambu mete yang dihasilkan	Batang	360.000	480.000	1.142.539	1.142.539	1.142.539
	Jumlah varietas benih jambu mete yang tersedia	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah varietas benih jambu mete yang dinilai/dievaluasi	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah benih jambu mete yang bermutu	batang	360.000	480.000	1.142.539	1.142.539	1.142.539
	Jumlah benih jambu mete yang tersertifikasi	batang	360.000	480.000	1.142.539	1.142.539	1.142.539
	Jumlah benih jambu mete yang tersedia	batang	360.000	480.000	1.142.539	1.142.539	1.142.539
	Jumlah benih jambu mete yang tersedia	batang	360.000	480.000	1.142.539	1.142.539	1.142.539
7	Jumlah benih aren yang dihasilkan	Batang	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Jumlah varietas benih aren yang tersedia	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah varietas benih aren yang dinilai/dievaluasi	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah benih aren yang bermutu	batang	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Jumlah benih aren yang tersertifikasi	batang	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



PENGUATAN PERBENIHAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah benih aren yang tersedia	batang	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Jumlah benih aren yang tersedia	batang	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Jumlah benih teh yang dihasilkan	Batang	2.364.573	2.374.467	1.519.400	1.519.400	1.519.400
	Jumlah varietas benih teh yang tersedia	varietas	2	1	1	1	1
	Jumlah varietas benih teh yang dinilai/dievaluasi	varietas	2	1	1	1	1
	Jumlah benih teh yang bermutu	batang	2.364.573	2.374.467	1.519.400	1.519.400	1.519.400
	Jumlah benih teh yang tersertifikasi	batang	2.364.573	2.374.467	1.519.400	1.519.400	1.519.400
	Jumlah benih teh yang tersedia	batang	2.364.573	2.374.467	1.519.400	1.519.400	1.519.400
	Jumlah benih teh yang tersedia	batang	2.364.573	2.374.467	1.519.400	1.519.400	1.519.400
9	Jumlah benih sagu yang dihasilkan	Batang	24.000	24.000	83.299	83.299	83.299
	Jumlah varietas benih sagu yang tersedia	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah varietas benih sagu yang dinilai/dievaluasi	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah benih sagu yang bermutu	Anakan	24.000	24.000	83.299	83.299	83.299
	Jumlah benih sagu yang tersertifikasi	Anakan	24.000	24.000	83.299	83.299	83.299
	Jumlah benih sagu yang tersedia	Anakan	24.000	24.000	83.299	83.299	83.299
	Jumlah benih sagu yang tersedia	Anakan	24.000	24.000	83.299	83.299	83.299
10	Jumlah benih tebu yang dihasilkan	Mata	247.200.000	4.188.286.500	1.284.309.346	1.351.476.343	1.422.540.877
	Jumlah varietas benih tebu yang tersedia	varietas	2	2	2	2	2
	Jumlah varietas benih tebu yang dinilai/dievaluasi	varietas	2	2	2	2	2



Lanjutan...

PENGUATAN PERBENIHAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah benih tebu yang bermutu	mata	247.200.000	4.188.286.500	1.284.309.346	1.351.476.343	1.422.540.877
	Jumlah benih tebu yang tersertifikasi	mata	247.200.000	4.188.286.500	1.284.309.346	1.351.476.343	1.422.540.877
	Jumlah benih tebu yang tersedia	mata	247.200.000	4.188.286.500	1.284.309.346	1.351.476.343	1.422.540.877
	Jumlah benih tebu yang tersedia	mata	247.200.000	4.188.286.500	1.284.309.346	1.351.476.343	1.422.540.877
11	Jumlah benih lada yang dihasilkan	Batang	86.645.680	90.977.920	8.317.942	8.348.898	8.380.164
	Jumlah varietas benih lada yang tersedia	varietas		2	2	2	2
	Jumlah varietas benih lada yang dinilai/dievaluasi	varietas		2	2	2	2
	Jumlah benih lada yang bermutu	batang	86.645.680	90.977.920	8.317.942	8.348.898	8.380.164
	Jumlah benih lada yang tersertifikasi	batang	86.645.680	90.977.920	8.317.942	8.348.898	8.380.164
	Jumlah benih lada yang tersedia	batang	86.645.680	90.977.920	8.317.942	8.348.898	8.380.164
	Jumlah benih lada yang tersedia	batang	86.645.680	90.977.920	8.317.942	8.348.898	8.380.164
12	Jumlah benih pala yang dihasilkan	Batang	4.817.956	5.203.396	3.496.003	3.498.787	3.501.598
	Jumlah varietas pala yang tersedia	varietas		2	2	2	2
	Jumlah varietas benih pala yang dinilai/dievaluasi	varietas		2	2	2	2
	Jumlah benih nira yang bermutu	batang	4.817.956	5.203.396	3.496.003	3.498.787	3.501.598
	Jumlah benih pala yang tersertifikasi	batang	4.817.956	5.203.396	3.496.003	3.498.787	3.501.598
	Jumlah benih pala yang tersedia	batang	4.817.956	5.203.396	3.496.003	3.498.787	3.501.598
	Jumlah benih pala yang tersedia	batang	4.817.956	5.203.396	3.496.003	3.498.787	3.501.598
13	Jumlah benih cengkeh yang dihasilkan	Batang	12.595.352	12.847.252	1.696.449	1.700.198	1.703.983



PENGUATAN PERBENIHAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah varietas cengkeh yang tersedia	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah varietas benih cengkeh yang dinilai/dievaluasi	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah benih cengkeh yang bermutu	batang	12.595.352	12.847.252	1.696.449	1.700.198	1.703.983
	Jumlah benih cengkeh yang tersertifikasi	batang	12.595.352	12.847.252	1.696.449	1.700.198	1.703.983
	Jumlah benih cengkeh yang tersedia	batang	12.595.352	12.847.252	1.696.449	1.700.198	1.703.983
	Jumlah benih cengkeh yang tersedia	batang	12.595.352	12.847.252	1.696.449	1.700.198	1.703.983
14	Jumlah benih tembakau yang dihasilkan	Gram	3.596.138	3.793.926	229.232	262.997	279.977
	Jumlah varietas benih tembakau yang tersedia	varietas	2	2	2	2	2
	Jumlah varietas benih tembakau yang dinilai/dievaluasi	varietas	2	2	2	2	2
	Jumlah benih tembakau yang bermutu	gram	3.596.138	3.793.926	229.232	262.997	279.977
	Jumlah benih tembakau yang tersertifikasi	gram	3.596.138	3.793.926	229.232	262.997	279.977
	Jumlah benih tembakau yang tersedia	gram	3.596.138	3.793.926	229.232	262.997	279.977
	Jumlah benih tembakau yang tersedia	gram	3.596.138	3.793.926	229.232	262.997	279.977
15	Jumlah benih vanili yang dihasilkan	Batang	11.155.200	11.580.450	1.421.000	1.417.500	1.417.500
	Jumlah varietas benih vanili yang tersedia	varietas	1	1	1	1	1



Lanjutan...

PENGUATAN PERBENIHAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah varietas benih vanili yang dinilai/dievaluasi	batang	1	1	1	1	1
	Jumlah benih vanili yang bermutu	batang	11.155.200	11.580.450	1.421.000	1.417.500	1.417.500
	Jumlah benih vanili yang tersertifikasi	batang	11.155.200	11.580.450	1.421.000	1.417.500	1.417.500
	Jumlah benih vanili yang tersedia	batang	11.155.200	11.580.450	1.421.000	1.417.500	1.417.500
	Jumlah benih vanili yang tersedia	batang	11.155.200	11.580.450	1.421.000	1.417.500	1.417.500
16	Jumlah benih serhewangi yang dihasilkan	Rumpun	61.530.210	62.145.512	4.745.254	4.745.254	4.745.254
	Jumlah varietas serhewangi yang tersedia	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah varietas benih serhewangi yang dinilai/dievaluasi	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah benih serhewangi yang bermutu	Rumpun	61.530.210	62.145.512	4.745.254	4.745.254	4.745.254
	Jumlah benih serhewangi yang tersertifikasi	Rumpun	61.530.210	62.145.512	4.745.254	4.745.254	4.745.254
	Jumlah benih serhewangi yang tersedia	Rumpun	61.530.210	62.145.512	4.745.254	4.745.254	4.745.254
	Jumlah benih serhewangi yang tersedia	Rumpun	61.530.210	62.145.512	4.745.254	4.745.254	4.745.254
17	Jumlah benih nilam yang dihasilkan	Stek	124.476.000	125.718.000	4.327.600	4.344.571	4.361.712
	Jumlah varietas nilam yang tersedia	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah varietas benih nilam yang dinilai/dievaluasi	varietas	1	1	1	1	1
	Jumlah benih nilam yang bermutu	setek	124.476.000	125.718.000	4.327.600	4.344.571	4.361.712



Lanjutan...

PENGUATAN PERBENIHAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah benih nilam yang tersertifikasi	setek	124.476.000	125.718.000	4.327.600	4.344.571	4.361.712
	Jumlah benih nilam yang tersedia	setek	124.476.000	125.718.000	4.327.600	4.344.571	4.361.712
	Jumlah benih nilam yang tersedia	setek	124.476.000	125.718.000	4.327.600	4.344.571	4.361.712
18	Jumlah benih kayu manis yang dihasilkan	Batang		1.505.976	1.505.976	1.505.976	1.505.976
	Jumlah varietas kayu manis yang tersedia	varietas		3	3	3	3
	Jumlah varietas benih kayu manis yang dinilai/dievaluasi	varietas		3	3	3	3
	Jumlah benih kayu manis yang bermutu	batang		1.505.976	1.505.976	1.505.976	1.505.976
	Jumlah benih kayu manis yang tersertifikasi	batang		1.505.976	1.505.976	1.505.976	1.505.976
	Jumlah benih kayu manis yang tersedia	batang		1.505.976	1.505.976	1.505.976	1.505.976
	Jumlah benih kayu manis yang tersedia	batang		1.505.976	1.505.976	1.505.976	1.505.976
19	Jumlah layanan publik kelembagaan benih perkebunan yang diberikan	Layanan		9	10	10	10
	Jumlah layanan publik kelembagaan benih perkebunan yang diberikan	Layanan		9	10	10	10
	Jumlah layanan publik kelembagaan produksi benih	Layanan		5	5	5	5
	Jumlah layanan publik kelembagaan pengawasan benih	Layanan		4	5	5	5



Lanjutan...

PENGUATAN PERBENIHAN PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
20	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Medan	Layanan	4	4	5	5	5
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Layanan	4	4	5	5	5
	Jumlah akreditasi lab perbenihan sesuai standar internasional	Akreditasi	1	1	1	1	1
	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	10	10	9	9	8
21	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Surabaya	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah akreditasi lab perbenihan sesuai standar internasional	Akreditasi	2	3	3	3	3
	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	18	17	17	16	15
22	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Ambon	Layanan	4	4	5	5	6
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Layanan	4	4	5	5	6
	Jumlah akreditasi lab perbenihan sesuai standar internasional	Akreditasi	1	1	1	2	2
	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	30	25	20	17	14



PASCAPANEN, PENGOLAHAN (HILIRISASI) DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET					
				2021	2022	2023	2024		
SK 1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan								
	1 Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan	%	1,80	1,82	1,85	2,00	2,10		
	Jumlah produk ekspor hasil perkebunan bernilai tambah yang diolah	Ton	1.446	1.300	1.262	1.332	1.497		
	Jumlah teknologi pengolahan yang diterapkan untuk pengolahan produk ekspor hasil perkebunan	Unit	110	129	129	166	184		
	Jumlah produk ekspor hasil perkebunan bernilai tambah yang melalui proses pasca panen	Ton	35.442	39.942	40.113	44.588	49.274		
	Jumlah teknologi pengolahan pasca panen yang diterapkan untuk produk ekspor hasil perkebunan	Unit	111	117	123	133	139		
	Jumlah pelaku usaha yang menghasilkan produk komoditas ekspor perkebunan sesuai standar dan/atau regulasi yang ditetapkan	Pelaku Usaha	10	10	11	11	12		
	Jumlah standarisasi dan/atau regulasi terkait mutu hasil perkebunan ekspor yang ditetapkan	Regulasi	2	2	2	3	3		
	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina terkait pengelolaan mutu produk ekspor hasil perkebunan	Pelaku Usaha	30	30	30	35	35		
	Jumlah produk ekspor hasil perkebunan yang dimanfaatkan	Komoditas	11	11	12	13	14		



Lanjutan...

PASCAPANEN, PENGOLAHAN (HILIRISASI) DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)				TARGET				
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah promosi produk ekspor hasil perkebunan	Promosi	3	4	5	6	8				
	Jumlah produk hasil perkebunan yang dimanfaatkan di pasar domestik	Komoditas	8	9	9	10	11				
	Jumlah promosi produk hasil perkebunan di pasar domestik	Promosi	3	4	5	6	6				
SK 2	Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan										
1	Tingkat pemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80,50	81,00	81,50	82,00				
	Jumlah sarana perkebunan pasca panen yang tersedia	Unit	117	123	129	140	146				
	Jumlah sarana pasca panen perkebunan yang didistribusikan	Unit	117	123	129	140	146				
	Jumlah sarana pengolahan hasil perkebunan yang tersedia	Unit	122	143	143	184	204				
	Jumlah sarana pengolahan perkebunan yang didistribusikan	Unit	122	143	143	184	204				



DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

LAMPIRAN 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020 - 2024

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET				
				2021	2022	2023	2024	
SK 1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien							
1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32,58	32,62	32,72	32,75	32,91	
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Perencanaan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Perencanaan	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Program yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Program	Kegiatan	3	3	3	3	3	
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Anggaran yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Anggaran	Kegiatan	3	3	3	3	3	
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Kerjasama yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Kerjasama	Kegiatan	2	2	2	2	2	
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Data dan Informasi yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Data dan Informasi	Kegiatan	2	2	2	2	2	



Lanjutan...

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIK LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan	3	3	3	3
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Keuangan	%	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perbendaharaan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perbendaharaan	Kegiatan	6	6	6	6
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kegiatan	4	4	4	4
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Umum yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Umum	%	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga	Kegiatan	4	4	4	4



DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIK LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Layanan Rekomendasi yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Layanan Rekomendasi	Kegiatan	2	2	2	2	2
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perlengkapan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perlengkapan	Kegiatan	9	9	9	9	9
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kegiatan	5	5	5	5	5
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian	Kegiatan	5	5	5	5	5



Lanjutan...

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
2	Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Perencanaan	%	81	81	81	81	82
	Tingkat Pemenuhan layanan Sub Kelompok Program	%	81	81	81	81	82
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Anggaran	%	81	81	81	81	82
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Kerjasama	%	81	81	81	81	82
	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan	%	82	83	83,7	84,3	85
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Data dan Informasi	%	81	81	82	82	82
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	%	84	85	86	87	88
	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Keuangan	%	82	82	82,7	82,7	83
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Perbendaharaan	%	82	82	83	83	83
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	82	82	82	82	82
	Tingkat pemenuhan layanan Bagian Umum	%	83	83	84	84	85



Lanjutan...

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIK LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			BASELINE (2020)	2021	2022	2023	2024
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga	%	84	84	85	86	87
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Layanan Rekomendasi	%	81	82	83	84	85
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Perlengkapan	%	82	82	83	83	84
	Tingkat Pemenuhan Layanan Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas	%	82	82	83	83	84
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian	%	82	82	83	84	85
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat	%	82	82	83	84	85
3	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	Level	3	3	3	3	4
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	Level	3	3	3	3	4
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	Level	3	3	3	3	4
4	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	%	75	80	85	85	85
	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	%	75	80	85	85	85



Lanjutan...

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	%		75	80	85	85
5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90
	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90
	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90
6	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan yang diberikan	Skala Likert (1-4)		3	3	3	3
	Tingkat kepuasan layanan ASN BBP2TP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)		3	3	3	3



DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIK LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
7	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
8	Tingkat kepuasan layanan ASN BBP2TP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
8	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
9	Tingkat kepuasan layanan ASN BBP2TP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
9	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
9	Tingkat kepuasan layanan ASN BPTP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
SK 2	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas						
1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85
	Rasio rekomendasi hasil money (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan	Nilai	85	85	85	85	85



Lanjutan...

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah rekomendasi hasil monev (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yang ditindaklanjuti	Kegiatan	6	6	6	6	6
SK 3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
SK 4	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5



DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIK LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK 5	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	Skala Likert (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	Skala Likert (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
SK 6	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5



Lanjutan...

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK 7	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5



